

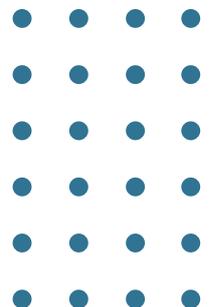
BAPPELITBANGDA KAB. LAMONGAN
Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah



LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2023



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, setiap instansi pemerintah, termasuk Bappelitbangda Kabupaten Lamongan, diwajibkan menyusun laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas, penilaian hasil kinerja, dan transparansi. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan strategis. Sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah, laporan kinerja memperlihatkan keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

Laporan kinerja Bappelitbangda Kabupaten Lamongan tahun 2023 ini merupakan gambaran dari tingkat pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Laporan kinerja yang disusun dan menyampaikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud dan pencapaian sasaran dilaksanakan dengan membandingkan kinerja aktual dengan rencana atau target dan membandingkan kinerja aktual dengan tahun-tahun sebelumnya yang berdasarkan pada target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra).

Selanjutnya, diharapkan laporan ini dapat menjadi dasar evaluasi untuk menciptakan kinerja Bappelitbangda Kabupaten Lamongan yang lebih baik. Terima kasih disampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan saran dan pendapat dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Lamongan Tahun 2023 ini.

Lamongan, Februari 2024
**KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN LAMONGAN**



SUARWO.S.T.M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19740930 200112 1 005





DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
1. Tugas dan Fungsi Bappelitbangda	2
2. Struktur Organisasi Bappelitbangda.....	3
C. Data Umum Organisasi.....	6
1. Sumber Daya Manusia Bappelitbangda	6
2. Identifikasi Permasalahan Bappelitbangda	7
3. Isu-isu Strategis Bappelitbangda.....	8
D. Sistematika Penyajian LKjIP	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....	10
B. Rencana Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun 2023	11
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
1. Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	22
2. Sasaran 2: Meningkatnya Inovasi Daerah.....	34
3. Sasaran 3: Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	37



B. Realisasi Anggaran.....	45
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	51

Lampiran-Lampiran



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Bappelitbangda Renstra Tahun 2021-2026.....	10
Tabel 2.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappelitbangda Tahun 2022.	11
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kepala Bappelitbangda Tahun 2022	17
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2022	20
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode RPJMD/Renstra Bappelitbangda Kabupaten Lamongan Tahun 2022	21
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Tahun 2022 Program Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda Kab. Lamongan	27
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Tahun 2022 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda Kabupaten Lamongan	31
Tabel 3.5 Target dan Realisasi Tahun 2022 Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Bappelitbangda Kabupaten Lamongan	36
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Tahun 2022 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Bappelitbangda Kabupaten Lamongan.....	42
Tabel 3.7 Alokasi Anggaran Per Sasaran.....	45
Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2022 Bappelitbangda	45
Tabel 3.8 Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 Bappelitbangda Kabupaten Lamongan	46



IKHTISAR EKSEKUTIF

BAPPELITBANGDA Kabupaten Lamongan sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan, dalam keberhasilan pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*), sehingga BAPPELITBANGDA dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Lamongan, dalam melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat serta memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya.

LKjIP Tahun 2023 merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPELITBANGDA Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 adalah dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAPPELITBANGDA Kabupaten Lamongan, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis.

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan capaian kinerja selama 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023 yang digunakan untuk menguji keberhasilan dan kegagalan kinerja instansi Pemerintah, menyajikan prosentase tingkat pencapaian kinerja kegiatan (menguji keberhasilan kinerja kegiatan/program) dan prosentase tingkat pencapaian sasaran (menguji pengukuran kinerja dinas/instansi dalam menjalankan Renstra Bappelitbangda yang berarti tugas, pokok dan fungsi Bappelitbangda).

Rencana Kerja Bappelitbangda pada tahun anggaran 2023, meliputi 1 (Satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran. Untuk mendukung keberhasilan tersebut telah dianggarkan plafon dana sebesar **Rp. 15.982.312.450** dan terealisasi sebesar **Rp. 14.716.060.236** atau **92,08%**.

Untuk mendukung tingkat keberhasilan program kerja di Bappelitbangda Kabupaten Lamongan, upaya-upaya yang perlu lebih ditingkatkan di tahun mendatang adalah:

1. Meningkatkan kerjasama antar instansi dan Perangkat Daerah, terutama dalam perencanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan serta rehabilitasi sarana prasarana yang memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatkan respons terhadap masukan, aspirasi, dan kritik dari masyarakat untuk mencapai *Good Governance* yang lebih baik.



3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur, khususnya di bidang perencanaan pembangunan, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian indikator kinerja yang telah direncanakan sebagai langkah mitigasi terhadap hambatan yang mungkin timbul selama pelaksanaan program pembangunan.
5. Mendorong terciptanya inovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan melibatkan secara aktif para pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun masyarakat.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Salah satu karakteristik dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah dapat dipertanggungjawabkannya capaian melalui mekanisme akuntabilitas publik. Sistem akuntabilitas yang baik menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dalam lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.

Sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan tujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah yang baik dan terpercaya dengan ditindaklanjuti adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah dituntut untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara demi terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sedangkan Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, penilaian hasil kinerja dan transparansi serta wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Lamongan sebagai Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 untuk disampaikan kepada Bupati. Penyampaian Laporan Kinerja Bappelitbangda



Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran strategis Bappelitbangda Kabupaten Lamongan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappelitbangda Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, khususnya berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Lamongan adalah badan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bappelitbangda sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan, dalam rangka menjamin terciptanya pembangunan yang efektif, efisien dan bersasaran yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang diwujudkan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam mendukung Visi Bupati Kabupaten Lamongan “**Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan**” serta menjadi pendukung pada misi ke-5 Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi, lebih lanjut Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan diatur dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 87 Tahun 2021. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. TUGAS DAN FUNGSI BAPPELITBANGDA

a. Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Lamongan sebagai unsur perencana penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan strategis perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan, mengkoordinasikan rencana pembangunan daerah, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan



pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bappelitbangda mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, pengembangan, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
- 2) Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 3) Pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta penyelenggaraan sinkronisasi perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan;
- 4) Pengkoordinasian penyusunan indikator keberhasilan perencanaan pembangunan daerah;
- 5) Pengkoordinasi pelaksanaan pengelolaan data perencanaan pembangunan, pengembangan, dan evaluasi perencanaan daerah serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah;
- 6) Penelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. STRUKTUR ORGANISASI BAPPELITBANGDA

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan, adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan, mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan daerah, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan.



b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan pelayanan teknis dibidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan Badan.

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, sebagai berikut:

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- 2) Sub Bagian Keuangan
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan perencanaan pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang perekonomian dan sumber daya alam.

d. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan perencanaan pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang infrasturktur dan kewilayahan.

e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan perencanaan pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia.

f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan perencanaan pembangunan lingkup bidang data, evaluasi dan pelaporan.

g. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, mengevaluasikan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan lingkup bidang ekonomi dan pembangunan, bidang sosial dan pemerintahan serta bidang inovasi dan teknologi.

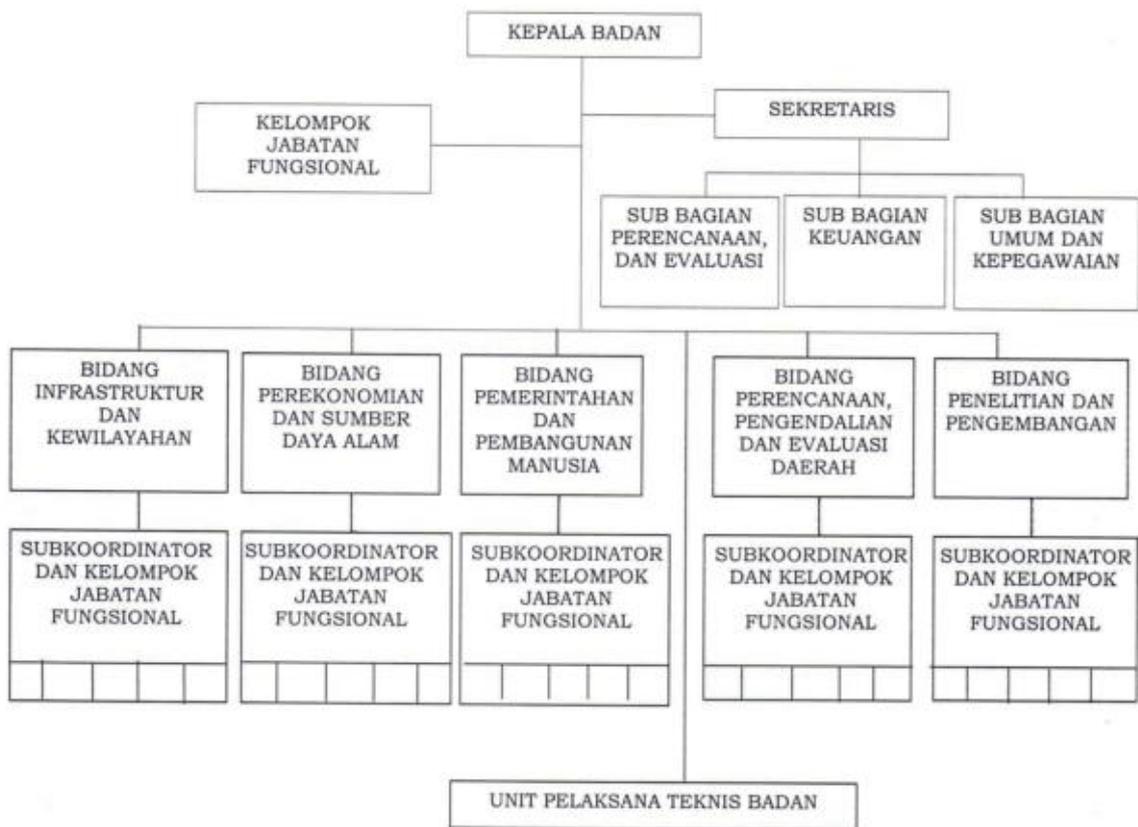
Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :



- h. UPT Badan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi BAPPELITBANGDA Kabupaten Lamongan selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar 1.1 berikut ini :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Lamongan Sesuai Peraturan Bupati Lamongan Nomor 87 Tahun 2021



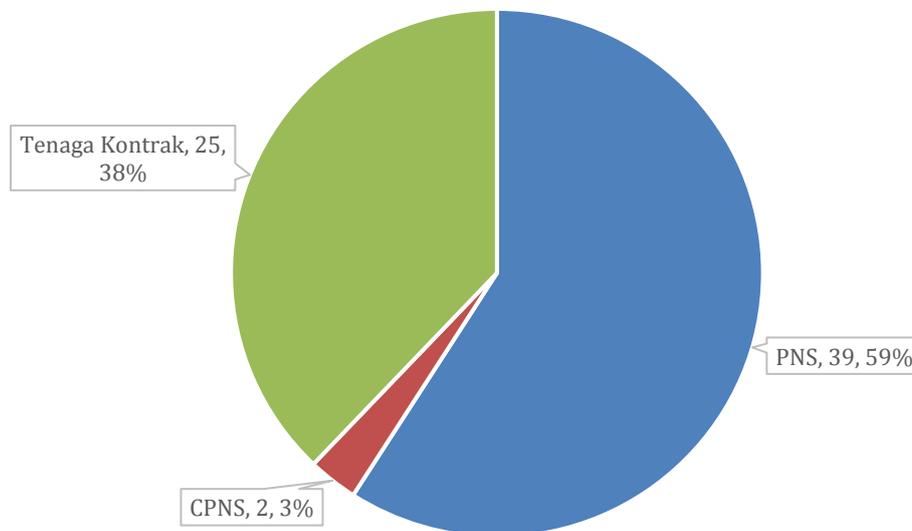


C. DATA UMUM ORGANISASI

1. SUMBER DAYA MANUSIA BAPPELITBANGDA

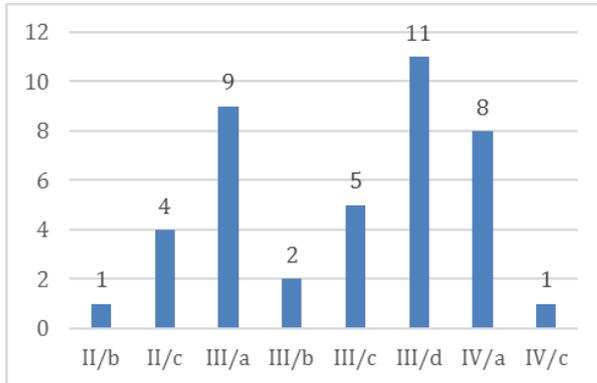
Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat / golongannya. Kondisi kepegawaian BAPPELITBANGDA Kabupaten Lamongan hingga akhir Desember 2023 secara singkat dipaparkan dalam informasi berikut :

Grafik 1.1:
Data Sumber Daya Manusia
Bappelitbangda Kabupaten Lamongan Tahun 2023

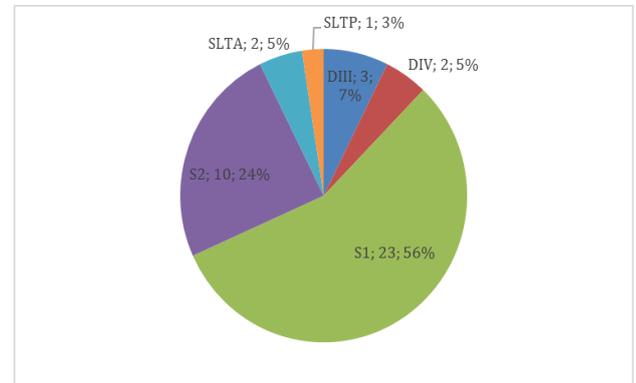




Grafik 1.2:
Data PNS & CPNS Berdasarkan Gol./Ruang
Bappelitbangda Kabupaten Lamongan Tahun 2023



Grafik 1.3:
Data PNS & CPNS Berdasarkan Pendidikan
Bappelitbangda Kabupaten Lamongan Tahun 2023



2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BAPPELITBANGDA

Eksistensi Bappelitbangda sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

- Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;
- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

Dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Lamongan menghadapi berbagai permasalahan dalam membuat perencanaan yang partisipatif, efisien, efektif dan akuntabel sesuai dengan harapan stakeholder.

Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Pelaporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang tidak tepat waktu dikarenakan kurangnya sumber daya manusia untuk monitoring capaian



- b. Penggunaan aplikasi SIPD Kemendagri yang terpusat yang sering mengalami gangguan server atau *maintenance* sehingga menghambat proses perencanaan
- c. Masih belum adanya satu data yang lengkap dan *real-time* sehingga menyebabkan proses perencanaan berjalan kurang optimal

3. ISU-ISU STRATEGIS BAPPELITBANGDA

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Isu-isu strategis dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan adalah :

- a. Penerapan system perencanaan terintegrasi berbasis aplikasi digital (SIPD) membutuhkan data dan informasi yang semakin akurat;
- b. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) khususnya tenaga perencana yang memiliki kompetensi (*skill*) yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
- c. Peningkatan pemahaman Perangkat Daerah terkait dengan perencanaan pembangunan.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP TAHUN 2023

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :



BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan Latar Belakang, Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Data Umum Organisasi dan Sistematika Penyajian LKjIP Tahun 2023.

BAB II: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Instansi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja organisasi sebagai berikut:

A.1 Pencapaian Kinerja;

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja;

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/Renstra

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan yang Telah Dilakukan

A.6 Analisis Atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

A.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian Kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta saran langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN:

1. Matriks Rencana Strategis (RS)
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
3. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2023
4. Lampiran lainnya (Penghargaan, Inovasi dll)



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Bappelitbangda Kabupaten Lamongan menyusun rencana strategis selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lamongan 2021 - 2026 dan Renstra Bappelitbangda Tahun 2021 - 2026 yang berorientasi kepada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Berikut tujuan, sasaran dan indikator sasaran Renstra Bappelitbangda Tahun 2021 - 2026 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Bappelitbangda
Renstra Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Berorientasi Hasil	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan	Prosentase Indikator Kinerja Daerah yang Tercapai	-	70,59%	73,53%	76,47%	79,41%	82,35%
		Prosentase Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Tercapai	-	71,60%	75,31%	79,01%	82,72%	86,42%
		Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	-	70,59%	72,76%	75,23%	77,71%	80,19%
	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah (IID)	804 (Skor)	40,00	42,00	46,00	52,00	60,00
	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Bappelitbangda	89,79	89,81	89,82	89,83	89,84	89,85

B. RENCANA KINERJA, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Lamongan disusun dalam dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023. Dalam dokumen tersebut dijabarkan hal-hal terkait tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam tahun tersebut, termasuk program, kegiatan, dan Sub Kegiatan yang harus dilaksanakan. Terdapat 4 (empat) program, 16 (enam belas) kegiatan serta 62 (enam puluh dua) sub kegiatan beserta masing-masing indikator dan target yang harus dicapai, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappelitbangda Tahun 2023
(Berdasarkan Pergeseran setelah Perubahan APBD Tahun 2023)

Uraian	Indikator	Target	Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Internal Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	82.50	10.707.287.200,00
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu	17 Dokumen	129.618.200,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	22.737.200,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	26.545.000,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.500.000,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	11 Laporan	44.836.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	26 Laporan	8.690.090.400,00
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/Bulan	8.616.870.400,00
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	33.220.000,00
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan	40.000.000,00



Uraian	Indikator	Target	Anggaran
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian	15 Dokumen	163.350.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	71 Paket	68.400.000,00
Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	94.950.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Persediaan Barang dan Jasa yang Tepat Waktu	12 Laporan	423.841.300,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.559.500,00
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	55.899.400,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	80.014.500,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	65.000.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	49.375.100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	28 Dokumen	25.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	124.992.800,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	17.313.200,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	17.313.200,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelayanan yang Tersedia Dengan Baik	100%	826.204.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	817.204.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	456.870.100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	66.968.400,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	107.470.200,00



Uraian	Indikator	Target	Anggaran
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan			
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	92.431.500,00
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	190.000.000,00
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Tepat Waktu	100 %	1.624.250.150,00
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	62 Perangkat Daerah	878.518.800,00
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	191.290.800,00
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	82.288.000,00
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	123.865.000,00
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1564 Usulan	53.600.000,00
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1 Dokumen	427.475.000,00
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dianalisis	31 Data	457.590.850,00
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	25.891.750,00
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	709 Orang	309.000.000,00
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	122.699.100,00
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	9 Dokumen	288.140.500,00
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	76.486.000,00



Uraian	Indikator	Target	Anggaran
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	10 Laporan	211.654.500,00
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Selaras dan Berorientasi Hasil	81%	2.716.857.200,00
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Selaras dan Berorientasi Hasil Lingkup Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	88 Dokumen	956.924.500,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	54.248.000,00
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	34 Perangkat Daerah	21.241.000,00
Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	22.840.000,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	223.556.000,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	60.623.500,00
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pembangunan Manusia	20 Laporan	135.407.000,00
Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	10 Perangkat Daerah	99.369.000,00
Koordinasi Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi	1 Laporan	340.000.000,00



Uraian	Indikator	Target	Anggaran
Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Koordinasi Perencanaan Perangkat Daerah yang Selaras dan Berorientasi Hasil Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	18 Dokumen	931.052.700,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	60.680.000,00
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	17.115.900,00
Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	6 Perangkat Daerah	15.000.000,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	410.224.000,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, Dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	371.991.300,00
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	3 Perangkat Daerah	30.901.500,00
Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	3 Perangkat Daerah	25.140.000,00
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Selaras dan Berorientasi Hasil Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	18 Dokumen	828.880.000,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	149.210.000,00



Uraian	Indikator	Target	Anggaran
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	5 Perangkat Daerah	15.226.000,00
Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 Perangkat Daerah	230.000.000,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	74.000.000,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	139.000.000,00
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	4 Perangkat Daerah	85.000.000,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Kewilayahan	4 Perangkat Daerah	22.744.000,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	113.700.000,00
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Peningkatan Hasil Penelitian/Kajian yang Ditindaklanjuti sebagai Dasar Perumusan Kebijakan Daerah	40%	933.917.900,00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Hasil Penelitian/Kajian yang Ditindaklanjuti Lingkup Bidang Sosial dan Kependudukan	2 Penelitian/Kajian	388.473.800,00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	175.938.700,00
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	212.535.100,00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Hasil Penelitian/Kajian yang Ditindaklanjuti Lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2 Penelitian/Kajian	299.933.600,00
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	149.933.600,00
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	150.000.000,00



Uraian	Indikator	Target	Anggaran
Umum			
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi dan Teknologi yang Dikembangkan	2 Inovasi	245.510.500,00
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	245.510.500,00

C PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Lamongan disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kerja tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2023. Selanjutnya, dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator strategis yang tertulis dalam Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 selanjutnya kedua indikator sasaran tersebut selanjutnya akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Lamongan dengan Bupati dalam rangka mendukung pencapaian IKU Bupati yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi Bappelitbangda.

Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja utama tahun 2023, dapat dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kepala Bappelitbangda Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Target*
Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan	Prosentase Indikator Kinerja Daerah yang Tercapai	91,18%
	Prosentase Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Tercapai	86,74%
	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	94,26%
Meningkatnya Inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah (IID)	59,00
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Bappelitbangda	91,45



Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) tahun 2023 terdiri dari 5 (Lima) indikator antara lain :

1. Prosentase Indikator Kinerja Daerah yang Tercapai
2. Prosentase Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Tercapai
3. Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai
4. Indek Inovasi Daerah (IID)
5. Nilai SAKIP Bappelitbangda

Catatan:

Terdapat penyesuaian dalam penetapan target Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Bappelitbangda tahun 2023 yang didasarkan pada hasil capaian kinerja tahun sebelumnya, sehingga angka yang tercantum berbeda dengan target yang ditetapkan pada Rencana Strategis Bappelitbangda tahun 2021-2026.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai unsur perencana penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan, mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan daerah, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan.

Selanjutnya dalam rangka untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan dibidang perencana pembangunan, penelitian dan pengembangan dapat diukur dengan capaian Indikator Kinerja selama 1 (satu) tahun dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Tahun 2023 dalam Perjanjian Kinerja Kepala Bappelitbangda Kabupaten Lamongan dengan Bupati Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan dalam pengukuran capaian keberhasilan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Lamongan menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, yakni :

1. Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan;
2. Meningkatnya Inovasi Daerah;
3. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah.



Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran Bappelitbangda pada tahun 2023 diukur melalui capaian indikator, seperti yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja
BAPPELITBANGDA Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target*	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan	Prosentase Indikator Kinerja Daerah yang Tercapai	91,18%	87,88%*	96,38%
	Prosentase Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Tercapai	86,74%	85,13%	98,14%
	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	94,26%	95,13%	100,92%
Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah (IID)	59,00	56,55	95,85%
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Bappelitbangda	91,45	91,67	100,24%

Catatan:

**) Angka Sementara karena terdapat Indikator Kinerja Daerah (Indeks Pemberdayaan Gender) yang belum rilis*

**) Terdapat penyesuaian dalam penetapan target Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Bappelitbangda tahun 2023 yang didasarkan pada hasil capaian kinerja tahun sebelumnya, sehingga angka yang tercantum berbeda dengan target yang ditetapkan pada Rencana Strategis Bappelitbangda tahun 2021-2026.*

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappelitbangda Kabupaten Lamongan dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappelitbangda Kabupaten Lamongan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappelitbangda yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/Renstra dapat dilihat dari tabel dibawah ini,



Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode RPJMD/Renstra
Bappelitbangda Kabupaten Lamongan Tahun 2023

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Kinerja Tahun 2023
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
1	<u>Tujuan</u> Indeks Perencanaan Pembangunan	N/A	70,79 %	73,73 %	76,73 %	79,73 %	82,73 %	82,73 %	88,78%*
2	<u>Sasaran</u> Prosentase Indikator Kinerja Daerah yang Tercapai	N/A	70,59 %	73,53 %	76,47 %	79,41%	82,35 %	82,35 %	87,88%*
	Prosentase Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Tercapai	N/A	71,60 %	75,31%	79,01 %	82,72 %	86,42 %	86,42 %	85,13%
	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	N/A	70,59 %	72,76 %	75,23 %	77,71 %	80,19 %	80,19 %	95,13%
	Indeks Inovasi Daerah (IID)	804	40,00	42,00	46,00	52,00	60,00	60,00	56,55
	Nilai SAKIP Bappelitbangda	89,79	89,81	89,82	89,83	89,84	89,85	89,85	91,67



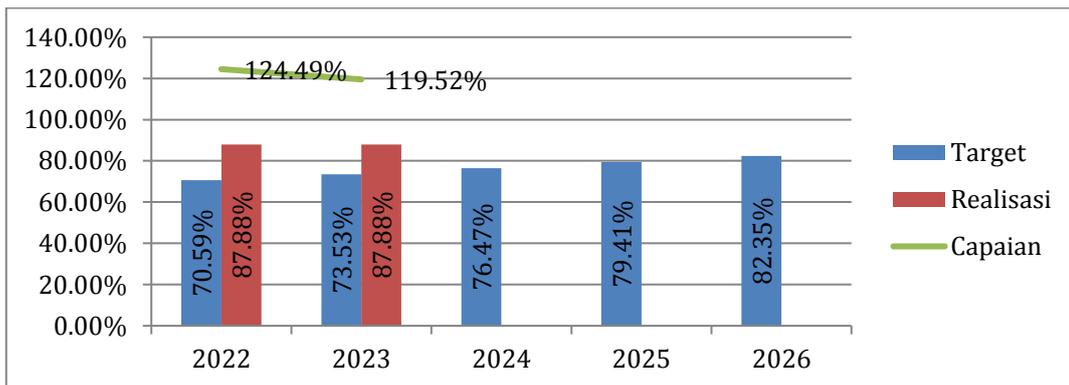
1. Sasaran 1: Meningkatkan Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran kinerja ini merupakan kinerja yang ingin dicapai oleh Bappelitbangda Kabupaten Lamongan berdasarkan peningkatan kinerja pembangunan daerah yang merupakan peran utama yang dilakukan oleh unit kerja ini. Pada tahun 2023, keberhasilan sasaran kinerja ini diukur berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja. Adapun penjelasannya adalah sebagaimana berikut:

a. Indikator Sasaran “Prosentase Indikator Kinerja Daerah Yang Tercapai”

Indikator ini mengukur tingkat capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026. Pada tahun 2023 Indikator Kinerja ini terealisasi diatas target yang telah ditetapkan yakni 88,78% dengan capaian sebesar 119,52%. Angka tersebut diperoleh dari sebanyak 29 IKD yang dinyatakan tercapai dari 33 IKD (Lampiran 1). Sementara itu, berdasarkan Grafik 3.1. juga dapat diamati bahwa terdapat peningkatan realisasi dan capaian kinerja indikator ini dari tahun sebelumnya dan telah melampaui target kinerja akhir jangka menengah tahun 2021-2026 yakni 82,35%.

Grafik 3.1
Prosentase Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2022-2023



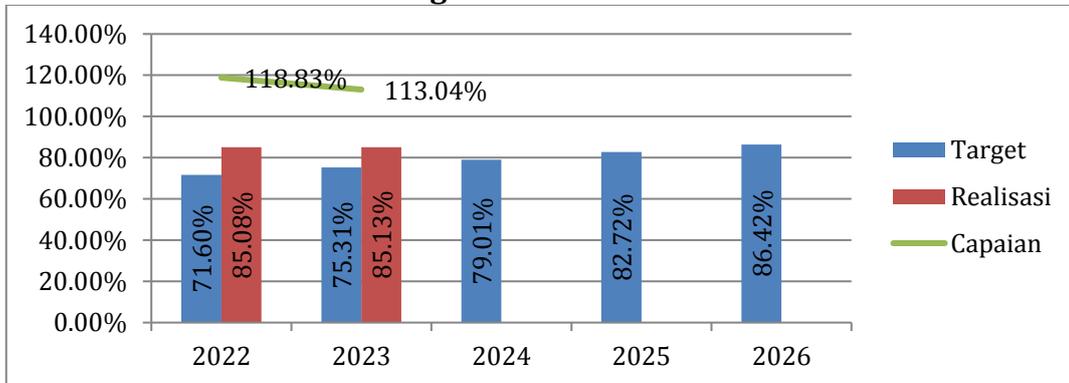
b. Indikator Sasaran “Prosentase Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Yang Tercapai”

Indikator ini mengukur tingkat capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026. Pada tahun 2023 Indikator Kinerja ini terealisasi diatas target yang telah ditetapkan yakni 85,13% dengan capaian sebesar 113,04%. Angka tersebut diperoleh dari sebanyak 166 yang dinyatakan tercapai dari sebanyak 195 IKU



PD (Lampiran 2). Sementara itu, berdasarkan Grafik 3.2. juga dapat diamati bahwa terdapat peningkatan realisasi dan capaian kinerja indikator ini dari tahun 2022 dan menunjukkan tren positif untuk pencapaian hasil akhir jangka menengah tahun 2021-2026 yakni 86,42%.

Grafik 3.2
Prosentase Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022-2023

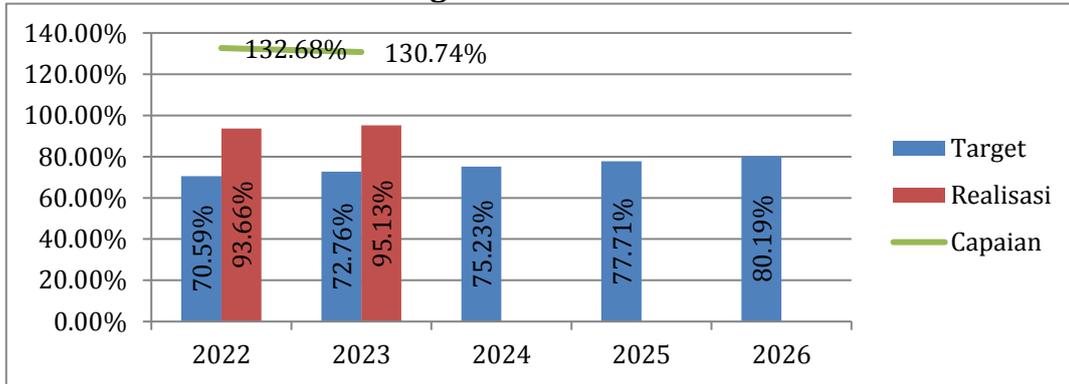


c. Indikator Sasaran “Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai”

Indikator ini mengukur tingkat capaian Indikator Program Perangkat Daerah (IKU PD) yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026. Pada tahun 2023 Indikator Kinerja ini terealisasi diatas target yang telah ditetapkan yakni 95,13% dengan capaian sebesar 130,74%. Angka tersebut diperoleh dari sebanyak 332 yang dinyatakan tercapai dari sebanyak 349 Indikator Program PD (Lampiran 3). Sementara itu, berdasarkan Grafik 3.3. juga dapat diamati bahwa terdapat peningkatan realisasi dan capaian kinerja indikator ini dari tahun 2022 dan menunjukkan tren positif dan melampaui target hasil akhir jangka menengah tahun 2021-2026 yakni 80,19%.



Grafik 3.3
Prosentase Capaian Indikator Program Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022-2023



Secara umum, pencapaian sasaran kinerja pertama ini menunjukkan kinerja Bappelitbangda yang mengalami peningkatan. Meskipun dalam beberapa komponen indikator, baik di level IKD, IKU PD maupun Indikator Program PD terdapat beberapa yang tidak tercapai, secara keseluruhan target kinerja yang ditetapkan pada masing-masing indikator telah terealisasi dengan capaian lebih dari 100%.

Pencapaian tersebut tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Bappelitbangda Kabupaten Lamongan, yaitu:

- Beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Lamongan, khususnya untuk memastikan dokumen perencanaan perangkat daerah berkualitas baik dan selaras dengan dokumen perencanaan yang ada di tingkat kabupaten seperti Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan serta Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri membuat penyusunan dokumen perencanaan menjadi lebih terintegrasi sehingga Bappelitbangda sebagai mitra perencanaan pembangunan perangkat daerah dapat terus melakukan pemantauan untuk memastikan dokumen perencanaan disusun dengan baik dan berkualitas.
- Pemanfaatan Sistem Inovasi Monitoring dan Evaluasi Lamongan (SIMELA) yang dirilis oleh Bappelitbangda bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah kabupaten Lamongan terutama pada IKU dan IK Sasaran melalui



pemantauan/monitoring kinerja Perangkat Daerah Mulai dari Indikator Kinerja Utama, program, kegiatan dan sub kegiatan.

- d. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*), seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, perusahaan swasta, USAID, LSM dan Akademisi, untuk mengawal implementasi program pembangunan dan memastikan ketercapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Pencapaian sasaran kinerja ini dicapai melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan pada dokumen perencanaan perangkat daerah dan dilaksanakan oleh bidang-bidang terkait. Secara keseluruhan, terdapat 2 (dua) program, 6 (enam) kegiatan, dan 33 sub kegiatan untuk mendukung sasaran kinerja ini. Berikut ini merupakan rincian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target dan realisasi kerjanya:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dilaksanakan untuk mendukung sasaran kinerja yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan. Program ini memiliki indikator kinerja berupa **“Prosentase Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Tepat Waktu”**. Pada tahun 2023 dokumen perencanaan pembangunan yang disusun adalah:

- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2023;
- Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 21 Juli 2023;
- Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 yang disampaikan pada tanggal 20 Maret 2023

Penanggung jawab dari pelaksanaan program ini adalah Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (Rendalev) yang mana ini didukung melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Berdasarkan Tabel 3.3, kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa **“Jumlah Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan Tepat Waktu”** dengan target 62 Perangkat Daerah yaitu seluruh perangkat daerah (PD) yang ada di Pemerintah Kabupaten Lamongan. Capaian kinerja indikator ini pada



tahun 2023 adalah sebesar 100%. Adapun dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun adalah:

- Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2023,
- Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 21 Juli 2023.

2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Berdasarkan Tabel 3.3, kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa ***“Jumlah Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dianalisis”*** dengan target kinerja sebesar 31 data. Capaian kinerja indikator ini pada tahun 2023 adalah sebesar 100%. Pada tahun 2023 Bappelitbangda Kabupaten Lamongan menyusun 2 (dua) dokumen perencanaan pembangunan yang mana data dan informasi yang dianalisis dijadikan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan tersebut. Adapun 31 data dan informasi tersebut meliputi data urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Data tersebut kemudian dijadikan sebagai basis data dalam program Satu Data Indonesia Kabupaten Lamongan.

3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Berdasarkan Tabel 3.3, kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa ***“Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan”*** dengan target 9 (sembilan) dokumen. Capaian kinerja indikator ini pada tahun 2023 adalah sebesar 100%. Pada tahun 2023 dokumen evaluasi dan pelaporan yang disusun adalah:

- Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 yang disampaikan pada tanggal 20 Maret 2023
- Laporan Evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2022
- Laporan Evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2023
- Laporan Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2023
- Laporan Evaluasi RKPD Triwulan III Tahun 2023

- Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Triwulan IV Tahun 2022
- Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Triwulan I Tahun 2023
- Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Triwulan II Tahun 2023
- Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Triwulan III Tahun 2023

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Tahun 2023
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Bappelitbangda Kabupaten Lamongan

Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Tepat Waktu	100 %	100 %	100%
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	62 Perangkat Daerah	63 Perangkat Daerah	102%
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1564 Usulan	5921 Usulan	379%
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dianalisis	31 Data	31 Data	100%
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	709 Orang	709 Orang	100%
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	100%
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	9 Dokumen	9 Dokumen	100%



Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Perencanaan Pembangunan Daerah				
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	100%
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	10 Laporan	10 Laporan	100%

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan. Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu: **“Prosentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Selaras dan Berorientasi Hasil”** dengan target tahun 2023 sebesar 80% dengan capaian sebesar 100%

Pelaksana dari program ini adalah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM), Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, yang bertanggung jawab pada capaian indikator kinerja di lingkup bidangnya masing-masing. Adapun capaian indikator kinerja pada tahun 2023 sesuai dengan Tabel 3.4 adalah sebagai berikut:

- Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Selaras dan Berorientasi Hasil Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Selaras dan Berorientasi Hasil Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Selaras dan Berorientasi Hasil Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Pelaksanaan program ini di dukung melalui 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang terkait, yaitu:

1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mendukung pencapaian indikator “Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah”. Penanggungjawab dari kegiatan ini adalah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Sesuai dengan Tabel 3.4, indikator kinerja dari



kegiatan ini adalah ***“Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Selaras dan Berorientasi Hasil Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia”***, dengan target 88 dokumen. Pada tahun 2023, capaian kinerja indikator ini mencapai 102,3% dengan rincian sebanyak 2 dokumen perencanaan (Renja & P-Renja) yang disusun oleh 45 perangkat daerah. Capaian ini melampaui target dikarenakan terdapat perangkat daerah baru yang dikoordinasi oleh Bidang PPM yaitu RSUD Karangsembang. Adapun perangkat daerah (PD) yang dikoordinasi oleh Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia adalah:

- Sekretariat Daerah
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
- Dinas Pendidikan
- Dinas Pemuda dan Olahraga
- BKPSDM
- RSUD Ngimbang
- RSUD Dr. Soegiri
- RSUD Karangsembang
- Dinas Sosial
- Dinas Kesehatan
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Satuan Polisi Pamong Praja
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
- Sekretariat DPRD
- Inspektorat
- Bakesbangpol
- Kecamatan Deket
- Kecamatan Glagah
- Kecamatan Sarirejo
- Kecamatan Sukorame
- Kecamatan Bluluk
- Kecamatan Modo
- Kecamatan Ngimbang
- Kecamatan Babat
- Kecamatankedungpring
- Kecamatan Brondong
- Kecamatan Laren
- Kecamatan Sekaran
- Kecamatan Maduran
- Kecamatan Sambeng
- Kecamatan Sugio
- Kecamatan Pucuk
- Kecamatan Paciran
- Kecamatan Solokuro
- Kecamatan Mantup
- Kecamatan Sukodadi
- Kecamatan Karanggeneng
- Kecamatan Kembangbahu
- Kecamatan Kalitengah
- Kecamatan Turi
- Kecamatan Lamongan
- Kecamatan Tikung
- Kecamatan Karangbinangun

2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) mendukung pencapaian indikator “Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah”.



Penanggungjawab dari kegiatan ini adalah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam. Sesuai dengan Tabel 3.4, indikator kinerja dari kegiatan ini adalah ***“Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Selaras dan Berorientasi Hasil Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)”*** dengan target 18 Dokumen. Pada tahun 2023, capaian kinerja indikator ini mencapai 100% dengan rincian sebanyak 2 dokumen perencanaan (Renja & P-Renja) yang disusun oleh 9 perangkat daerah. Adapun perangkat daerah (PD) yang dikoordinasi oleh Bidang Perekonomian dan SDA adalah:

- Dinas Tenaga Kerja
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
- Dinas Perikanan
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- Badan Pendapatan Daerah

3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mendukung pencapaian indikator “Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah”. Penanggungjawab dari kegiatan ini adalah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Sesuai dengan Tabel 3.4, indikator kinerja dari kegiatan ini adalah ***“Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Selaras dan Berorientasi Hasil Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan”*** dengan target 18 Dokumen. Pada tahun 2023, capaian kinerja indikator ini mencapai 100% dengan rincian sebanyak 2 dokumen perencanaan (Renja & P-Renja) yang disusun oleh 9 perangkat daerah. Adapun perangkat daerah (PD) yang dikoordinasi oleh Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan adalah:

- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
- Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Perhubungan
- Dinas Komunikasi dan Informatika
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah



Tabel 3.4
Target dan Realisasi Tahun 2023
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappelitbangda Kabupaten Lamongan

Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Selaras dan Berorientasi Hasil	81%	100%	123,45%
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Selaras dan Berorientasi Hasil Lingkup Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	88 Dokumen	90 Dokumen	102,3%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	100%
Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan	100%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	100%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pembangunan Manusia	20 Laporan	22 Laporan	110%
Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	10 Perangkat Daerah	11 Perangkat Daerah	110%

Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	100%
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Koordinasi Perencanaan Perangkat Daerah Yang Selaras dan Berorientasi Hasil Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	18 Dokumen	18 Dokumen	100%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	100%
Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	100%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	100%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, Dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	100%
Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	100%
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Selaras dan Berorientasi Hasil Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	18 Dokumen	18 Dokumen	100%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Infrastruktur (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	100%
Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	100%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	100%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	100%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Kewilayahan	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	100%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	100%

Untuk menjadi catatan dalam pencapaian sasaran kinerja perencanaan pembangunan diketahui bahwa terdapat beberapa indikator kinerja tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal yang dinilai menghambat pencapaian kinerja perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Lamongan. Secara umum, berikut ini adalah beberapa alasan menurunnya kinerja Prosentase Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang tercapai:

- Kondisi eksternalitas, seperti adanya kemarau panjang dan perubahan iklim yang menyebabkan gagal panen pada beberapa komoditas pertanian tertentu, sehingga menurunkan daya beli masyarakat.
- Penerimaan daerah yang menurun dan defisit anggaran, sehingga berdampak pada beberapa program pembangunan yang telah direncanakan.

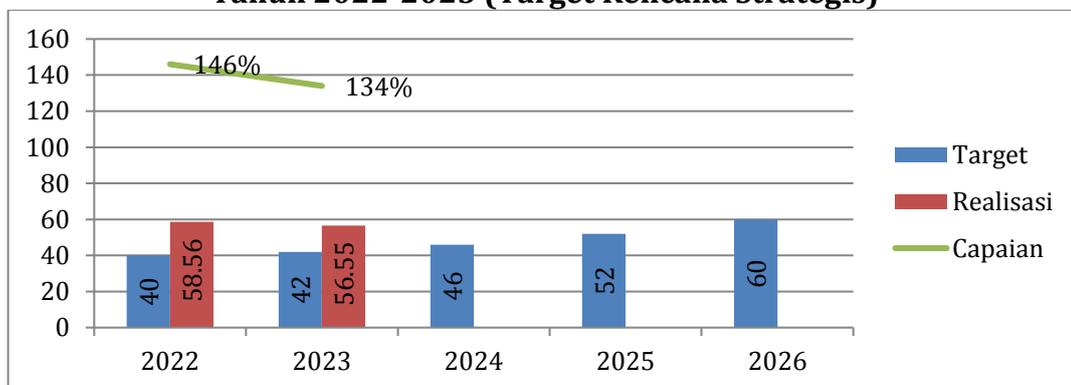


2. Sasaran 2: Meningkatnya Inovasi Daerah

Sasaran kinerja ini merupakan kinerja yang ingin dicapai oleh Bappelitbangda Kabupaten Lamongan berdasarkan kinerja inovasi daerah. Oleh pada tahun 2023, keberhasilan sasaran kinerja ini diukur berdasarkan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu **“Indeks Inovasi Daerah”**. Penilaian indikator ini dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berdasarkan lembar kerja evaluasi proposal inovasi perangkat daerah dan instansi pelayanan publik lainnya dan disampaikan pada agenda Indonesia Government Award (IGA) tahun 2023.

Dapat dilihat pada Grafik 3.4 menunjukkan bahwa target indikator sasaran tersebut telah terealisasi dengan baik di atas target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 56,55 atau kategori **“Inovatif”**. Capaian ini mengalami penurunan dari tahun 2022 dari yaitu 58,56. Meskipun demikian, capaian tersebut masih menunjukkan kinerja positif dari sasaran tersebut untuk mencapai hasil kinerja akhir jangka menengah pada tahun 2026 yaitu sebesar 60,00.

Grafik 3.4
Capaian Indeks Inovasi Daerah (IID)
Tahun 2022-2023 (Target Rencana Strategis)



Secara umum, pencapaian sasaran kinerja kedua ini menunjukkan peningkatan. Pencapaian tersebut tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Bappelitbangda Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

- Program pendampingan yang dilakukan kepada perangkat daerah mulai dari identifikasi potensi inovasi, analisis kebutuhan, pengembangan solusi, pelatihan, dan evaluasi implementasi inovasi dan juga pelaporannya.
- Inovator di perangkat daerah menunjukkan komitmen dengan berpartisipasi aktif, memahami manfaat inovasi, mendukung perubahan, menyediakan sumber daya, dan menjalankan komunikasi efektif. Komitmen ini menjadi kunci kesuksesan implementasi inovasi dan peningkatan kinerja.



Di sisi lain, pencapaian sasaran kinerja ini juga didukung melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang terkait. Secara keseluruhan, terdapat 1 (satu) program, 3 (tiga) kegiatan, dan 6 sub kegiatan. Berikut ini merupakan rincian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target dan realisasi kinerjanya:

a. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dilaksanakan untuk mendukung sasaran kinerja yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan. Program ini memiliki indikator kinerja yaitu ***“Prosentase Hasil Kajian yang Dimanfaatkan Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan Daerah”***, dengan target kinerja sebesar 40%. Pada tahun 2023, realisasi kinerja program ini sebesar 47% dengan capaian sebesar 118%.

Penanggung jawab dari program ini adalah Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang), untuk pelaksanaan program ini didukung dengan 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang sosial dan Kependudukan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Berdasarkan Tabel 3.5, kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa ***“Jumlah Hasil Penelitian/Kajian yang Ditindaklanjuti Lingkup Bidang Sosial dan Kependudukan”*** dengan target 2 (dua) hasil penelitian/kajian. Pada tahun 2023, realisasi kinerja program ini adalah 2 dokumen penelitian yang mencakup:

- Kajian Optimalisasi Program “Yakin Semua Sejahtera” (YSS) di Kabupaten Lamongan
- Kajian Efektivitas Beasiswa dalam Mendorong Peningkatan Harapan Lama Sekolah

2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Berdasarkan Tabel 3.5, kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa ***“Jumlah Hasil Penelitian/Kajian yang Ditindaklanjuti Bidang Ekonomi dan Pembangunan”*** dengan target 2 (dua) hasil penelitian/kajian. Pada tahun 2023, realisasi kinerja program ini adalah 2 dokumen penelitian yang mencakup:

- Kajian Unsur Hara pada Lahan Sawah Irigasi di Kabupaten Lamongan
- Kajian Efektivitas Program Jalan Mantap dan Alus Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023

3) Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Berdasarkan Tabel 3.5 kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa “Jumlah Inovasi dan Teknologi yang Dikembangkan” dengan target 2 (dua) inovasi dan teknologi. Pada tahun 2023, realisasi kinerja kegiatan ini adalah 3 inovasi dan teknologi yang difasilitasi dalam Anugerah Inovasi Daerah dan Inovasi Teknologi (Inotek Award) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, yang mencakup:

- Inovasi Penyiraman Tanaman Bunga Krisan (*Chrysanthemum*) Otomatis Berbasis IOT (oleh Universitas Bilfath)
- Lean Product Development Kaldu Gamori Fortifikasi dari Daun Kelor (*Moringa Oleifera Lam.*) dengan Protein Ikan Gabus (*Channa Striata*) sebagai Kaldu Sehat (oleh Nusantara Megilan)
- Klepon Nakhla (oleh Universitas Islam Lamongan)

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Tahun 2023
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Bappelitbangda Kabupaten Lamongan

Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Peningkatan Hasil Penelitian/Kajian yang Ditindaklanjuti sebagai Dasar Perumusan Kebijakan Daerah	40%	47%	118%
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Hasil Penelitian/Kajian yang Ditindaklanjuti Lingkup Bidang Sosial dan Kependudukan	2 Penelitian/ Kajian	2 Penelitian/ Kajian	100%
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Hasil Penelitian/Kajian yang Ditindaklanjuti Lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2 Penelitian/ Kajian	2 Penelitian/ Kajian	100%
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%



Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi dan Teknologi yang Dikembangkan	2 Inovasi	3 Inovasi	150%
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan	100%

Untuk menjadi catatan dalam pencapaian sasaran kinerja peningkatan inovasi daerah diketahui bahwa kinerja tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal yang dinilai menghambat pencapaian kinerja peningkatan inovasi daerah di Kabupaten Lamongan. Secara umum, berikut ini adalah beberapa alasan menurunnya kinerja Indeks Inovasi Daerah:

- Kurangnya dorongan dan investasi dalam riset serta pengembangan inovasi di Kabupaten Lamongan.
- Keterbatasan keterampilan dan kompetensi SDM yang terlibat dalam manajemen inovasi.
- Kurangnya dukungan dan komitmen dari pimpinan pelaksana inovasi terhadap visi dan tujuan inovasi.
- Kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dalam proses inovasi.
- Sistem pelaporan inovasi yang kompleks dan memakan waktu, mengalihkan fokus dari kreativitas inovasi ke administrasi berlebihan.

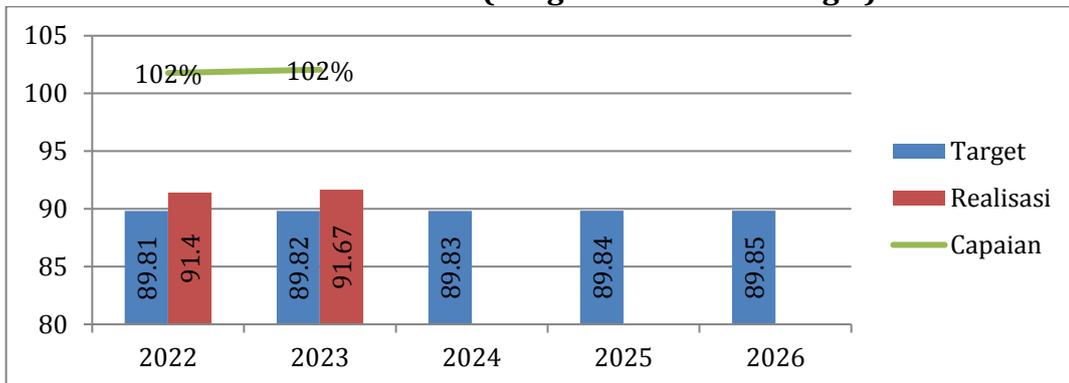
3. Sasaran 3: Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah

Sasaran kinerja ini merupakan kinerja yang ingin dicapai oleh Bappelitbangda Kabupaten Lamongan berdasarkan kinerja pengelolaan dan administratif dalam ruang lingkup internal Bappelitbangda. oleh Pada tahun 2023, keberhasilan sasaran kinerja ini diukur berdasarkan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu **“Nilai SAKIP Bappelitbangda”**. Penilaian indikator ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan berdasarkan lembar kerja evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dapat dilihat pada Grafik 3.4 menunjukkan bahwa target indikator sasaran tersebut telah terealisasi dengan baik diatas target yang telah di tetapkan yaitu sebesar 91,67 atau dengan kategori “AA”. Sementara itu, juga dapat diamati bahwa terdapat peningkatan realisasi dan capaian kinerja indikator ini dari tahun 2022 dan telah melampaui target hasil akhir jangka menengah tahun 2021-2026 yakni 89,85.



Grafik 3.5
Nilai SAKIP Bappelitbangda
Tahun 2022-2023 (Target Rencana Strategis)



Secara umum, pencapaian sasaran kinerja peningkatan manajemen internal Bappelitbangda Kab. Lamongan ini menunjukkan peningkatan. Pencapaian tersebut tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Bappelitbangda Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

- Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja sehingga memberikan arah yang baik untuk pengembangan manajemen internal.
- Upaya dalam meningkatkan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan yang berkontribusi pada peningkatan kinerja.
- Evaluasi dan optimalisasi proses manajemen internal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional.
- Penggunaan teknologi informasi yang efektif untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam manajemen internal.

Di sisi lain, pencapaian sasaran kinerja ini juga didukung melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang terkait. Secara keseluruhan, terdapat 1 (satu) program, 7 (tujuh) kegiatan, dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan. Berikut ini merupakan rincian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target dan realisasi kerjanya:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk mendukung sasaran kinerja yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan. Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu **“Nilai IKM Internal Bappelitbangda Kabupaten Lamongan”** dengan target nilai IKM sebesar 82,50. Pada tahun 2023, target ini telah terealisasi sebesar



83,70 dengan capaian sebesar 100%. Penanggung jawab dari program ini adalah Sekretariat Bappelitbangda Kabupaten Lamongan yang mana pelaksanaan program ini didukung dengan 7 (tujuh) kegiatan, yaitu:

1) **Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Tabel 3.6, kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa ***“Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu”***. Pada tahun 2023 kegiatan ini telah terealisasi capaian sebesar 100% dengan keluaran berupa dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja sebanyak 17 (tujuh belas) dokumen, yaitu:

- Dokumen Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2024
- Dokumen Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2023
- Dokumen RKA Bappelitbangda Tahun 2024
- Dokumen Perubahan RKA Bappelitbangda Tahun 2023
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2024
- Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran 2023
- Dokumen LKPJ Bappelitbangda Tahun 2022
- Dokumen LPPD Bappelitbangda Tahun 2022
- Dokumen LKjIP Bappelitbangda Tahun 2022
- Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2022
- Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2023
- Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023
- Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2023
- Dokumen Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2022
- Dokumen Evaluasi Renja Triwulan I Tahun 2023
- Dokumen Evaluasi Renja Triwulan II Tahun 2023
- Dokumen Evaluasi Renja Triwulan III Tahun 2023

2) **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Tabel 3.6, kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa ***“Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu”***. Pada tahun 2023 kegiatan ini telah terealisasi capaian sebesar 100% dengan keluaran berupa dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja sebanyak 26 (dua puluh enam) Laporan, yaitu:

- Dokumen Laporan Gaji Bulan Januari s/d Desember Tahun 2023 sebanyak 12 (dua belas) Laporan;

- Dokumen Laporan Keuangan Bulan Januari s/d Desember Tahun 2023 sebanyak 12 (dua belas) Laporan;
- Dokumen Laporan Akhir Tahun 2023;
- Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Tahun 2023.

3) **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini memiliki indikator berupa **“Jumlah Dokumen Kepegawaian”** dengan target sebanyak 15 Dokumen yang disusun. Pada tahun 2023, capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100%. Adapun dokumen yang telah disusun diantaranya:

- Buku Penjagaan Pengajuan Kartu Pegawai
- Buku Penjagaan Pensiun dan Realisasinya
- Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat
- Buku Penjagaan Sumpah/Janji PNS
- Buku Penjagaan Pengajuan Kartu Peserta Taspen
- Buku Penjagaan Mutasi
- Buku Penjagaan Permohonan Izin Belajar
- Buku Penjagaan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
- Buku Penjagaan Latihan Pra Jabatan
- Buku Penjagaan Tanda Penghargaan
- Buku Penjagaan Cuti
- Buku Penjagaan Peningkatan Diklat
- Buku Penjagaan Pelantikan Jabatan
- Buku Penjagaan Karis/Karsu
- Buku Penjagaan Izin Menjadi Anggota Parpol

4) **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Tabel 3.6, kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa **“Jumlah Laporan Persediaan Barang dan Jasa yang Tepat Waktu”** dengan target sebanyak 12 Laporan yang disusun setiap bulannya. Pada tahun 2023, capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100%.

5) **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan



Tabel 3.6, kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa ***“Jumlah Laporan Pengadaan Barang dan Jasa”*** dengan target kinerja sebanyak 1 Laporan. Pada tahun 2023 kegiatan ini telah terealisasi capaian sebesar 100% dengan rincian pengadaan paket mebel sebanyak 3 unit.

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Tabel 3.6, kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa ***“Prosentase Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia Dengan Baik”***. Pada tahun 2023 kegiatan ini telah terealisasi capaian sebesar 100% dengan jumlah pelayanan yang ada sebanyak 2 pelayanan sesuai dengan sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini, yaitu:

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Tabel 3.6, kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa ***“Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah”***. Pada tahun 2023 kegiatan ini telah terealisasi capaian sebesar 100% dengan jumlah item yang dipelihara adalah sebagai berikut:

- Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya sebanyak 1 unit;
- Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 30 unit;
- Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 4 unit;
- Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 1 gedung.



Tabel 3.6
Target dan Realisasi Tahun 2023
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Bappelitbangda Kabupaten Lamongan

Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Internal Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	82.50	83.70	100,45%
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu	17 Dokumen	17 Dokumen	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	11 Laporan	11 Laporan	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	26 Laporan	26 Laporan	100%
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	100%
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian	15 Dokumen	15 Dokumen	100%

Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	71 Paket	71 Paket	100%
Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	65 Orang	65 Orang	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Persediaan Barang dan Jasa yang Tepat Waktu	12 Laporan	12 Laporan	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	28 Dokumen	20 Dokumen	71,43%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan	100%
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	2 Unit	67%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelayanan yang Tersedia Dengan Baik	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%

Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Kendaraan Dinas Jabatan				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	100%
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	100%
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	1 Gedung	100%

- **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan diperlukan dukungan antara lain pemenuhan SDM Perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan sekurang-kurangnya 17 Perencana mengingat tugas dan fungsi perencana yang mencakup banyak lingkup bidang sektoral. Sementara jumlah Perencana yang ada di Bappelitbangda Kab. Lamongan saat ini berjumlah 12 orang, sehingga masih terdapat kekurangan Perencana sebanyak 5 orang.

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mendorong tercapainya target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, baik RPJMD, Renstra, maupun SOP (Standar Operasional Prosedur) guna mendukung kelancaran dan pelayanan publik.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023. Selanjutnya sumber daya anggaran yang tersedia sebesar Rp 15.982.312.450,- telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar Rp 14.716.060.236,- atau 92,08%. Sementara sisa anggaran sebesar Rp 1.266.252.214,- atau 7,92% yang merupakan SILPA di Kas Daerah. Adapun alokasi per sasaran dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.7
Alokasi Anggaran Per Sasaran

Sasaran / Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan:	Rp 4.341.107.350,-	Rp 4.139.119.987,-	95,35%
Meningkatnya Inovasi Daerah:	Rp 933.917.900	Rp 929.448.350	99,52%
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah:	Rp 10.707.287.200	Rp 9.647.491.899	90,10%



Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2023 Bappelitbangda

Sasaran / Indikator Kinerja	(%) Capaian Kinerja	(%) Realisasi Anggaran	(%) Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan: <ul style="list-style-type: none">• Prosentase Indikator Kinerja Daerah yang Tercapai• Prosentase Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Tercapai• Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	98,48%	95,35%	3,13%
Meningkatnya Inovasi Daerah: <ul style="list-style-type: none">• Indeks Inovasi Daerah	95,85%	99,52%	-3,67%
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah: <ul style="list-style-type: none">• Nilai SAKIP Bappelitbangda	100,24%	90,10%	10,14%

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui anggaran yang direncanakan telah dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Bappelitbangda Kabupaten Lamongan pada Tahun 2023.

B. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), mengingat alokasi anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan sebagaimana dalam APBD tahun 2023, pada dasarnya untuk mendukung keberhasilan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban Bappelitbangda Kabupaten Lamongan. Namun demikian analisis capaian kinerja efisiensi harus dilakukan untuk mendukung prinsip-prinsip penganggaran. Adapun rincian alokasi dan realisasi anggaran Bappelitbangda Lamongan pada tahun 2023 berdasarkan Pergeseran setelah Perubahan APBD Tahun 2023 seperti yang tersaji pada Tabel 3.9:

Tabel 3.9
Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2023
Bappelitbangda Kabupaten Lamongan
(Berdasarkan Pergeseran setelah Perubahan APBD Tahun 2023)

Uraian	Anggaran	Realisasi	Penyerapan (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.707.287.200,00	9.647.491.899,00	90,10
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	129.618.200,00	122.883.814,00	94,80
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.737.200,00	22.737.050,00	100,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	26.545.000,00	26.545.000,00	100,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.500.000,00	15.500.000,00	100,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.836.000,00	38.101.764,00	84,98
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.690.090.400,00	7.790.580.702,00	89,65
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	8.616.870.400,00	7.720.176.702,00	89,59
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	33.220.000,00	30.834.000,00	92,82
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	40.000.000,00	39.570.000,00	98,93
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	163.350.000,00	159.150.000,00	97,43
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	68.400.000,00	68.150.000,00	99,63
Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	94.950.000,00	91.000.000,00	95,84
Administrasi Umum Perangkat Daerah	423.841.300,00	400.667.500,00	94,53
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.559.500,00	23.559.500,00	100,00
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	55.899.400,00	51.775.000,00	92,62
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	80.014.500,00	79.784.100,00	99,71
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.375.100,00	49.375.000,00	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	25.000.000,00	20.480.000,00	81,92
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	124.992.800,00	110.693.900,00	88,56
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.313.200,00	16.650.000,00	96,17
Pengadaan Mebel	17.313.200,00	16.650.000,00	96,17
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	826.204.000,00	702.432.983,00	85,02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	9.000.000,00	3.669.773,00	40,78
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	817.204.000,00	698.763.210,00	85,51

Uraian	Anggaran	Realisasi	Penyerapan (%)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	456.870.100,00	455.126.900,00	99,62
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.968.400,00	66.536.400,00	99,35
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	107.470.200,00	107.268.800,00	99,81
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	92.431.500,00	91.813.500,00	99,33
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	190.000.000,00	189.508.200,00	99,74
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.624.250.150,00	1.591.764.569,00	98,00
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	878.518.800,00	855.288.659,00	97,36
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	191.290.800,00	179.114.600,00	93,63
Pelaksanaan Konsultasi Publik	82.288.000,00	81.503.000,00	99,05
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	123.865.000,00	122.739.300,00	99,09
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	53.600.000,00	52.849.900,00	98,60
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	427.475.000,00	419.081.859,00	98,04
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	457.590.850,00	451.941.250,00	98,77
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	25.891.750,00	24.781.600,00	95,71
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	309.000.000,00	307.274.150,00	99,44
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	122.699.100,00	119.885.500,00	97,71
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	288.140.500,00	284.534.660,00	98,75
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	76.486.000,00	75.798.900,00	99,10
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	211.654.500,00	208.735.760,00	98,62
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.716.857.200,00	2.547.355.418,00	93,76
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	956.924.500,00	856.132.200,00	89,47
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, RKPDP)	54.248.000,00	37.874.500,00	69,82

Uraian	Anggaran	Realisasi	Penyerapan (%)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	21.241.000,00	9.993.450,00	47,05
Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	22.840.000,00	15.907.000,00	69,65
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	223.556.000,00	216.245.400,00	96,73
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPD)	60.623.500,00	56.117.700,00	92,57
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	135.407.000,00	113.896.200,00	84,11
Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	99.369.000,00	90.848.900,00	91,43
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	340.000.000,00	315.249.050,00	92,72
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam)	931.052.700,00	914.294.750,00	98,20
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60.680.000,00	59.705.850,00	98,39
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	17.115.900,00	15.365.850,00	89,78
Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	15.000.000,00	11.800.000,00	78,67
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	410.224.000,00	406.355.100,00	99,06
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, Dan RKPD)	371.991.300,00	369.415.100,00	99,31
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	30.901.500,00	29.299.900,00	94,82
Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	25.140.000,00	22.352.950,00	88,91
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	828.880.000,00	776.928.468,00	93,73



Uraian	Anggaran	Realisasi	Penyerapan (%)
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	149.210.000,00	138.609.500,00	92,90
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	15.226.000,00	13.679.686,00	89,84
Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	230.000.000,00	226.028.600,00	98,27
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	74.000.000,00	59.250.807,00	80,07
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	139.000.000,00	132.171.342,00	95,09
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	85.000.000,00	83.781.500,00	98,57
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	22.744.000,00	15.760.956,00	69,30
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	113.700.000,00	107.646.077,00	94,68
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.032.000.000	929.448.350,00	99,52
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	933.917.900,00	387.540.800,00	99,76
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	388.473.800,00	175.305.700,00	99,64
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	175.938.700,00	212.235.100,00	99,86
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	212.535.100,00	297.594.850,00	99,22
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	299.933.600,00	147.594.850,00	98,44
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	149.933.600,00	150.000.000,00	100,00
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	150.000.000,00	244.312.700,00	99,51
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	245.510.500,00	244.312.700,00	99,51
Jumlah Belanja	15.982.312.450,00	14.716.060.236,00	92,08



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Lamongan pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Penyusunan LKjIP juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 yang dituangkan menjadi 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Secara keseluruhan, capaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Lamongan Tahun 2023 telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan dengan faktor sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan dengan indikator :
 - Prosentase Indikator Kinerja Daerah yang Tercapai
 - Prosentase Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Tercapai
 - Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai
2. Meningkatnya Inovasi Daerah dengan indikator :
 - Indeks Inovasi Daerah (IID)
3. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah dengan indikator :
 - Nilai SAKIP Bappelitbangda Kabupaten Lamongan

Sebagai bahan penutup dari Laporan Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Lamongan dapat disimpulkan bahwa pencapaian target indikator kinerja Bappelitbangda Kabupaten Lamongan ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen baik dari aparatur Negara, masyarakat dan dunia usaha sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan kinerja yang telah dicapai, diperlukan adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak terkait pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Lamongan. Upaya-upaya yang dilakukan agar pelaksanaan lebih baik di tahun mendatang adalah dalam bentuk :

1. Meningkatkan kerjasama antar instansi dan Perangkat Daerah, terutama dalam perencanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan serta rehabilitasi sarana prasarana yang memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatkan respons terhadap masukan, aspirasi, dan kritik dari masyarakat untuk mencapai *Good Governance* yang lebih baik.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur, khususnya di bidang perencanaan pembangunan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian indikator kinerja yang telah direncanakan sebagai langkah mitigasi terhadap hambatan yang mungkin timbul selama pelaksanaan program pembangunan.
5. Mendorong terciptanya inovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan melibatkan secara aktif para pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Lamongan, Februari 2024

**KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN LAMONGAN**



SUJARWO, S.T., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19740930 200112 1 005



LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

Rekapitulasi Indikator Kinerja Daerah yang Tercapai

Tujuan/Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan	Pertumbuhan Ekonomi	Tercapai
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Persentase Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Tidak Tercapai
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Persentase Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	Tercapai
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Persentase Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	Tercapai
Meningkatnya Belanja Wisatawan	Jumlah pengeluaran Wisatawan	Tercapai
Meningkatnya Efektivitas Investasi	Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi	Tercapai
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan	Gini Rasio	Tidak Tercapai
Meningkatnya Pemberdayaan dan Pendapatan Masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender	Belum Rilis
Meningkatnya Pemberdayaan dan Pendapatan Masyarakat	Nilai Tukar Petani (NTP)	Tercapai
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan	Prosentase Penduduk Miskin	Tercapai
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Prosentase PPKS yang meningkat kapasitasnya	Tercapai
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tidak Tercapai
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Daya Beli	Tidak Tercapai
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Tercapai
Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	Tercapai
Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan	Indeks Kesehatan	Tercapai
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	Tercapai
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Tercapai
Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas Dan Merata	Indeks Infrastruktur	Tercapai



Tujuan/Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Tercapai
Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Tercapai
Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal	Indeks Kesalehan Sosial	Tercapai
Meningkatnya Toleransi	Nilai Toleransi	Tercapai
Meningkatnya Rasa Aman Masyarakat	Nilai Stabilitas	Tercapai
Meningkatnya Solidaritas Masyarakat Dalam Bergotongroyong	Nilai Solidaritas	Tercapai
Meningkatnya Masyarakat Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Tercapai
Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa	Indeks Reformasi Birokrasi	Tercapai
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif	Nilai IKM	Tercapai
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif	Indeks SPBE	Tercapai
Meningkatnya Kapasitas ASN Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Tercapai
Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal	Nilai SAKIP	Tercapai
Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal	Opini BPK	Tercapai
Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal	Maturitas SPIP	Tercapai
Meningkatnya Kemandirian Desa	Prosentase Peningkatan Desa Mandiri	Tercapai

Rekapitulasi

$$\frac{\text{Jumlah Indikator Kinerja Daerah yang Tercapai}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{29}{33} \times 100\%$$

$$= 87,88\%$$



LAMPIRAN 2

Rekapitulasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Tercapai

Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Capaian
Dinas Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tercapai
Dinas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tercapai
Dinas Pendidikan	Prosentase Guru Bersertifikat Pendidik	Tercapai
Dinas Pendidikan	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan	Tercapai
Dinas Kesehatan	angka harapan hidup	Tercapai
Dinas Kesehatan	nilai sakip dinas kesehatan	Tercapai
RSUD dr. Soegiri	Nilai SAKIP RSUD Dr. Soegiri	Tercapai
RSUD dr. Soegiri	capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) RS	Tercapai
RSUD Ngimbang	Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Tercapai
RSUD Ngimbang	Nilai SAKIP RSUD Ngimbang	Tercapai
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	Indeks Infrastruktur Jalan	Tercapai
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	Indeks Infrastruktur Jembatan	Tercapai
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	Nilai SAKIP Dinas PU Bina Marga	Tercapai
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	Rasio luasan sawah yang terlayani irigasi saat musim tanam	Tercapai
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	Nilai SAKIP Dinas PU. Sumber Daya Air	Tercapai
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Indeks Air Minum	Tercapai
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Indeks Limbah	Tercapai
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Indeks Drainase	Tercapai
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Indeks IMB	Tercapai
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Indeks Permukiman	Tercapai
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Tidak Tercapai
Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibum dan Peraturan Daerah yang terselesaikan	Tercapai
Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran yang Tertangani	Tercapai
Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai Sakip Satpol PP Kab. Lamongan	Tercapai
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Presentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Daerah Rawan Bencana	Tercapai
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Presentase Korban Terdampak Bencana Yang Ditangani	Tercapai



Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Capaian
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Presentase Pemulihan Pasca Bencana Yang Dilaksanakan	Tercapai
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai Sakip BPBD	Tercapai
Dinas Sosial	persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Tercapai
Dinas Sosial	persentase potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Tercapai
Dinas Sosial	Nilai SAKIP	Tercapai
Dinas Tenaga Kerja	Persentase Penduduk yang Bekerja	Tidak Tercapai
Dinas Tenaga Kerja	Nilai Sakip	Tercapai
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan (Ekonomi, Sosial dan Politik)	Tercapai
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Pemenuhan Hak Anak	Tercapai
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan	Tercapai
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan	Tercapai
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nilai SAKIP DPPP	Tercapai
Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Tercapai
Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Tercapai
Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Tidak Tercapai
Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP DLH	Tercapai
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Prosentase Perekaman KTP Elektronik	Tidak Tercapai
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Prosentase KIA Yang Diterbitkan	Tercapai
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	Tidak Tercapai
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Prosentase Penerbitan Akta Kematian	Tercapai
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Prosentase Penerbitan Akta Perkawinan	Tercapai
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Prosentase Penerbitan Akta Perceraian	Tercapai
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Jumlah Titik Layanan Yang Terfasilitasi Dengan SAK dan DKB Dalam Urusan Administrasi Kependudukan	Tercapai
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Persentase Buku Profil Kependudukan dan Baliho Yang Tersedia	Tercapai
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Nilai SAKIP Disdukcapil	Tercapai



Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Capaian
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Jumlah Desa Maju	Tercapai
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tercapai
Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Rate/ mCPR) (%)	Tercapai
Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB	Nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kab. Lamongan	Tercapai
Dinas Perhubungan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Yang Berkualitas	Tercapai
Dinas Perhubungan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Tercapai
Dinas Komunikasi Dan Informatika	Persentase PD yang e-Gov nya terintegrasi	Tercapai
Dinas Komunikasi Dan Informatika	Nilai SAKIP Diskominfo	Tercapai
Dinas Koperasi Dan UM	Prosentase peningkatan pelaku usaha mikro yang terfasilitas permodalan	Tercapai
Dinas Koperasi Dan UM	Persentase koperasi aktif	Tercapai
Dinas Koperasi Dan UM	Nilai Sakip Diskopum	Tercapai
Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMDN	Tercapai
Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA	Tidak Tercapai
Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	Tercapai
Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	Nilai Sakip DPMPPTSP	Tercapai
Dinas Pemuda dan Olahraga	Prosentase Pemuda Berprestasi	Tercapai
Dinas Pemuda dan Olahraga	Prosentase Cabang Olahraga Berprestasi	Tercapai
Dinas Pemuda dan Olahraga	Nilai SAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga	Tercapai
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Tercapai
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Persentase Ketersediaan Arsip yang Autentik, Utuh, dan Terpercaya	Tercapai
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Nilai SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Tercapai
Dinas Perikanan	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Tercapai
Dinas Perikanan	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Tidak Tercapai
Dinas Perikanan	Indeks Harga Yang Diterima Petani (it)	Tercapai
Dinas Perikanan	Nilai Sakip Dinas Perikanan	Tercapai
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	% Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Tercapai
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	% Peningkatan Retribusi Pariwisata	Tercapai
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	% Seni, Budaya Lokal, dan Benda / Situs Cagar Budaya yang dilestarikan	Tercapai
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Nilai SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Tercapai
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Persentase peningkatan populasi ternak besar	Tidak Tercapai



Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Capaian
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Persentase peningkatan populasi ternak kecil	Tercapai
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Persentase peningkatan populasi ternak unggas	Tercapai
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Indeks harga yang diterima peternak (It)	Tidak Tercapai
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Nilai Sakip Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Tercapai
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	Tercapai
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman padi	Tidak Tercapai
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman jagung	Tidak Tercapai
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas kedelai	Tidak Tercapai
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman kacang hijau	Tercapai
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas kacang tanah	Tercapai
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas ubi kayu	Tercapai
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas ubi jalar	Tidak Tercapai
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas sorgum	Tidak Tercapai
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas bawang merah	Tercapai
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman cabe rawit	Tercapai
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman cabe besar	Tidak Tercapai
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman melon	Tidak Tercapai
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman semangka	Tidak Tercapai
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman blewah	Tidak Tercapai
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman mangga	Tercapai
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pisang	Tidak Tercapai
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pepaya	Tercapai
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tebu	Tercapai



Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Capaian
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tembakau	Tidak Tercapai
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas kenaf	Tercapai
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Indeks harga yang diterima petani	Tidak Tercapai
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Indeks harga yang diterima petani sub sektor tanaman pangan*	Tercapai
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Indeks harga yang diterima petani hortikultura*	Tercapai
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Indeks harga yang diterima petani perkebunan*	Tidak Tercapai
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Nilai SAKIP PD	Tercapai
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	persentase peningkatan volume perdagangan	Tercapai
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	persentase skala usaha menengah terhadap IKM	Tercapai
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	nilai SAKIP Disperindag	Tidak Tercapai
Sekretariat Daerah	Nilai IKM Sekretariat Daerah	Tercapai
Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Tercapai
Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Tercapai
Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Tercapai
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Prosentase Indikator Kinerja Daerah Yang Tercapai	Tercapai
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Prosentase Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Yang Tercapai	Tercapai
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	Tercapai
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Tercapai
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Nilai SAKIP Bappelitbangda	Tercapai
BPKAD	Prosentase Akurasi penganggaran APBD	Tercapai
BPKAD	Prosentase deviasi penyerapan keuangan sesuai target	Tidak Tercapai
BPKAD	Prosentase Penyampaian LKPD tepat waktu dan sesuai SAP	Tercapai
BPKAD	Prosentase Rasio Utilitas Aset terhadap total Aset	Tercapai



Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Capaian
BPKAD	Nilai Sakip BPKAD	Tercapai
Badan Pendapatan Daerah	Prosentaseb Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tidak Tercapai
Badan Pendapatan Daerah	Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah	Tercapai
BKPSDM	Indeks Sistem Merit	Tercapai
BKPSDM	Nilai SAKIP BKPSDM	Tercapai
Inspektorat	Kapabilitas APiP	Tercapai
Inspektorat	Manajemen Risiko Indek	Tercapai
Inspektorat	Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	Tercapai
Inspektorat	Nilai SAKIP	Tercapai
Kecamatan Lamongan	Jumlah Desa Maju	Tercapai
Kecamatan Lamongan	Nilai SAKIP Kecamatan	Tercapai
Kecamatan Babat	Jumlah Desa Maju	Tercapai
Kecamatan Babat	Nilai SAKIP Kecamatan	Tercapai
Kecamatan Paciran	Jumlah Desa Maju	Tercapai
Kecamatan Paciran	Nilai SAKIP Kecamatan	Tercapai
Kecamatan Brondong	Jumlah Desa Maju	Tercapai
Kecamatan Brondong	Nilai SAKIP Kecamatan	Tercapai
Kecamatan Turi	Jumlah Desa Maju	Tercapai
Kecamatan Turi	Nilai SAKIP Kecamatan	Tercapai
Kecamatan Pucuk	Jumlah Desa Maju	Tercapai
Kecamatan Pucuk	Nilai SAKIP Kecamatan	Tercapai
Kecamatan Sukodadi	Jumlah Desa Maju	Tercapai
Kecamatan Sukodadi	Nilai SAKIP KECAMATAN	Tercapai
Kecamatan Tikung	Jumlah Desa Maju	Tercapai
Kecamatan Tikung	Nilai SAKIP Kecamatan	Tercapai
Kecamatan Deket	Jumlah Desa Maju	Tercapai
Kecamatan Deket	Nilai SAKIP Kecamatan	Tercapai
Kecamatan Kembangbahu	Jumlah Desa Maju	Tercapai
Kecamatan Kembangbahu	Nilai SAKIP Kecamatan	Tercapai
Kecamatan Mantup	Jumlah Desa Maju	Tercapai
Kecamatan Mantup	Nilai SAKIP Kecamatan	Tercapai
Kecamatan Modo	Jumlah Desa Maju	Tercapai
Kecamatan Modo	Nilai SAKIP Kecamatan	Tercapai
Kecamatan Karangbinangun	Jumlah Desa Maju	Tercapai
Kecamatan Karangbinangun	Nilai SAKIP Kecamatan	Tercapai
Kecamatan Glagah	Jumlah Desa Maju	Tercapai
Kecamatan Glagah	Nilai SAKIP Kecamatan	Tercapai
Kecamatan Ngimbang	Jumlah Desa Maju	Tercapai
Kecamatan Ngimbang	Nilai Sakip Kecamatan	Tercapai
Kecamatan Sugio	Jumlah Desa Maju	Tercapai
Kecamatan Sugio	Nilai SAKIP Kecamatan	Tercapai
Kecamatan Karanggeneng	Jumlah Desa Maju	Tercapai
Kecamatan Karanggeneng	Nilai SAKIP Kecamatan	Tercapai
Kecamatan Sambeng	Jumlah Desa Maju	Tercapai



Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Capaian
Kecamatan Sambeng	Nilai SAKIP Kecamatan	Tercapai
Kecamatan Kedungpring	Jumlah Desa Maju	Tercapai
Kecamatan Kedungpring	Nilai SAKIP Kecamatan	Tercapai
Kecamatan Laren	Jumlah Desa Maju	Tercapai
Kecamatan Laren	Nilai SAKIP Kecamatan	Tercapai
Kecamatan Sekaran	Jumlah Desa Maju	Tercapai
Kecamatan Sekaran	Nilai SAKIP Kecamatan	Tidak Tercapai
Kecamatan Sarirejo	Jumlah Desa Maju	Tercapai
Kecamatan Sarirejo	Nilai SAKIP Kecamatan	Tercapai
Kecamatan Sukorame	Jumlah Desa Maju	Tercapai
Kecamatan Sukorame	Nilai SAKIP Kecamatan	Tidak Tercapai
Kecamatan Solokuro	Jumlah Desa Maju	Tercapai
Kecamatan Solokuro	Nilai SAKIP Kecamatan	Tidak Tercapai
Kecamatan Maduran	Nilai SAKIP Kecamatan	Tercapai
Kecamatan Maduran	Jumlah Desa Maju	Tercapai
Kecamatan Kalitengah	Jumlah Desa Maju	Tercapai
Kecamatan Kalitengah	Nilai SAKIP Kecamatan	Tercapai
Kecamatan Bluluk	Jumlah Desa Maju	Tercapai
Kecamatan Bluluk	Nilai SAKIP Kecamatan	Tercapai
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase konflik ipoleksosbud, hukum dan HAM yang ditangani	Tercapai
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase peningkatan pendidikan politik	Tercapai
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tercapai
RSUD Karangkembang	Nilai SAKIP RSUD Karangkembang	Tidak Tercapai
RSUD Karangkembang	Capaian IKM RSUD	Tercapai

Rekapitulasi

$$\frac{\text{Jumlah Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Tercapai}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{166}{195} \times 100\%$$

$$= 85,13\%$$



LAMPIRAN 3

Rekapitulasi Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah yang Tercapai

Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian
Dinas Pendidikan	Nilai IKM	Tercapai
Dinas Pendidikan	APK SD/MI	Tidak Tercapai
Dinas Pendidikan	APK SMP/MTS	Tidak Tercapai
Dinas Pendidikan	APK PAUD	Tercapai
Dinas Pendidikan	APK Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tercapai
Dinas Pendidikan	Persentase Sekolah Yang Mengimplementasikan Kurikulum Muatan Lokal	Tercapai
Dinas Pendidikan	Persentase Guru PAUD, SD, SMP Berkualifikasi Pendidikan Minimal S1/D4	Tercapai
Dinas Kesehatan	Nilai IKM	Tercapai
Dinas Kesehatan	Persentase Fasyankes Sesuai Standar Akreditasi	Tercapai
Dinas Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Memenuhi Standar Kompetensi	Tercapai
Dinas Kesehatan	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minuman Yang Sesuai Standar	Tercapai
Dinas Kesehatan	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang aktif	Tercapai
RSUD dr. Soegiri	Nilai IKM Internal RSUD Dr. Soegiri	Tercapai
RSUD dr. Soegiri	Prosentase SPM yang memenuhi standar	Tercapai
RSUD Ngimbang	Nilai IKM Internal RSUD Ngimbang	Tercapai
RSUD Ngimbang	Prosentase SPM (Standar Pelayanan Minimal)	Tercapai
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	Nilai IKM	Tercapai
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	Tidak Tercapai
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jembatan	Tercapai
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	Nilai IKM	Tercapai
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	Prosentase Ketersediaan Air Baku	Tercapai
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	Prosentase Luas Area Bebas Genangan Banjir	Tercapai
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	Prosentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	Tercapai
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Persentase Rumah Yang Terlayani SPAM	Tercapai
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Persentase Sarana dan Prasarana Persampahan Yang Tersedia	Tercapai



Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Persentase Akses Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Tercapai
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	Tercapai
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Rasio Kepatuhan IMB	Tercapai
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Tercapai
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Tercapai
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Prosentase kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang	Tercapai
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Nilai IKM	Tercapai
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Persentase Pemenuhan Rumah Korban Bencana	Tidak Tercapai
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 ha Di Kab/Kota Yang Ditangani	Tercapai
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Persentase Rumah Layak Huni	Tercapai
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Persentase Rumah Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Tercapai
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Persentase sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Tercapai
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Persentase penyelesaian santunan atas kerugian tanah untuk pembangunan	Tercapai
Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai IKM	Tercapai
Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Gangguan Trantibum	Tercapai
Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati	Tercapai
Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Kejadian Kebakaran Yang Tertangani	Tercapai
Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Kejadian Non Kebakaran Yang Tertangani	Tercapai



Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai IKM	Tercapai
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase Penanggulangan Bencana	Tercapai
Dinas Sosial	Nilai IKM	Tercapai
Dinas Sosial	Persentase PSKS Yang Meningkatkan Kapasitasnya	Tercapai
Dinas Sosial	Persentase Korban Tindak Kekerasan Yang Tertangani	Tercapai
Dinas Sosial	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Pelayanan dan Direhabilitasi	Tercapai
Dinas Sosial	Persentase PPKS Yang Terlayani Perlindungan dan Jaminan Sosial	Tercapai
Dinas Sosial	Persentase Korban Bencana Yang Tertangani	Tercapai
Dinas Sosial	Taman Makam Pahlawan Dalam Kondisi Baik	Tercapai
Dinas Tenaga Kerja	Nilai IKM	Tercapai
Dinas Tenaga Kerja	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator Dalam Rencana Tenaga Kerja	Tercapai
Dinas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Tercapai
Dinas Tenaga Kerja	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	Tidak Tercapai
Dinas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Tercapai
Dinas Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan UU bidang ketenagakerjaan	Tercapai
Dinas Tenaga Kerja	Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	Tercapai
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nilai IKM	Tercapai
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Peningkatan Perempuan Produktif Yang Berperan Dalam Pembangunan (Ekonomi, Sosial dan Politik);	Tercapai
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan Yang Diselesaikan	Tercapai
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Perempuan Yang Berperan Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga	Tercapai
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Tersedianya Data Profil Gender dan Anak	Tercapai
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Forum Anak Yang Terbentuk	Tercapai



Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Kasus Kekerasan Anak Yang Diselesaikan	Tercapai
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Nilai IKM	Tercapai
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah lumbung pangan yang meningkat statusnya	Tercapai
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Persentase ketersediaan cadangan pangan	Tercapai
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan yang meningkat statusnya	Tercapai
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	Tercapai
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Prosentase sarana pertanian dalam kondisi baik	Tercapai
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Prosentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	Tercapai
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Prosentase penurunan luasan gagal panen	Tercapai
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Prosentase Kelembagaan/kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	Tercapai
Dinas Lingkungan Hidup	Nilai IKM	Tercapai
Dinas Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Dipenuhi	Tercapai
Dinas Lingkungan Hidup	Presentase Pemenuhan Kualitas Air	Tercapai
Dinas Lingkungan Hidup	Presentase Pemenuhan Kualitas Udara	Tercapai
Dinas Lingkungan Hidup	Presentase Tutupan Lahan	Tercapai
Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan atau usaha yang memenuhi ketentuan teknis penyimpanan LB3	Tercapai
Dinas Lingkungan Hidup	Presentase Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan, Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kabupaten	Tercapai
Dinas Lingkungan Hidup	Persentase Wilayah Yang Peduli dan Berwawasan Lingkungan	Tercapai
Dinas Lingkungan Hidup	Persentase Sekolah yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan	Tercapai
Dinas Lingkungan Hidup	Presentase Perusahaan Yang Memenuhi Semua Aspek Yang Diperkirakan KLHK	Tercapai
Dinas Lingkungan Hidup	Prosentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Persetujuan Lingkunga Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kabupaten	Tercapai
Dinas Lingkungan Hidup	Persentase tingkat pelayanan persampahan	Tercapai
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Nilai IKM	Tercapai
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Prosentase Perekaman KTP Elektronik	Tidak Tercapai



Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Prosentase KIA Yang Diterbitkan	Tercapai
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	Tidak Tercapai
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Prosentase Penerbitan Akta Kematian	Tercapai
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Prosentase Penerbitan Akta Perkawinan	Tercapai
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Prosentase Penerbitan Akta Perceraian	Tercapai
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Jumlah Titik Layanan Yang Terfasilitasi Dengan SAK dan DKB Dalam Urusan Administrasi Kependudukan	Tercapai
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Persentase Buku Profil Kependudukan dan Baliho Yang Tersedia	Tercapai
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Nilai IKM	Tercapai
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Prosentase Desa yang Tertata dengan baik	Tercapai
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Prosentase Kerjasama antar Desa yang berjalan dengan baik	Tercapai
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Prosentase tata kelola administrasi Desa yang tertib	Tercapai
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Aktif	Tercapai
Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB	Nilai IKM	Tercapai
Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB	Persentase Data Informasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) yang tersedia Akurat dan Tepat Waktu	Tercapai
Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Tercapai
Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB	Cakupan Anggota Poktan yang aktif Dalam Pertemuan Pembinaan BKB, BKR, BKL	Tercapai
Dinas Perhubungan	Nilai IKM	Tercapai
Dinas Perhubungan	Persentase Sarana Prasarana Perhubungan Yang Berfungsi	Tercapai
Dinas Komunikasi Dan Informatika	Nilai IKM	Tercapai
Dinas Komunikasi Dan Informatika	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Informasi Publik	Tercapai
Dinas Komunikasi Dan Informatika	Persentase Aplikasi Terintegrasi	Tercapai
Dinas Komunikasi Dan Informatika	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun pembangunan daerah	Tercapai
Dinas Komunikasi Dan Informatika	Persentase Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi	Tercapai



Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian
Dinas Koperasi Dan UM	Nilai IKM	Tercapai
Dinas Koperasi Dan UM	Persentase Koperasi Yang Berizin	Tercapai
Dinas Koperasi Dan UM	Persentase Penurunan Koperasi Berstatus Dalam Pengawasan	Tercapai
Dinas Koperasi Dan UM	Persentase Koperasi Yang Sehat	Tercapai
Dinas Koperasi Dan UM	Persentase SDM Koperasi Yang Bersertifikat	Tercapai
Dinas Koperasi Dan UM	Persentase Koperasi Yang Mendapatkan Fasilitas Kemitraan	Tercapai
Dinas Koperasi Dan UM	Persentase peningkatan aset usaha mikro	Tercapai
Dinas Koperasi Dan UM	Persentase penumbuhan usaha mikro	Tercapai
Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	Nilai IKM	Tercapai
Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	Prosentase Peningkatan Minat Investasi	Tidak Tercapai
Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	Prosentase Promosi Penanaman Modal Yang Dilaksanakan	Tercapai
Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	Jumlah Perizinan yang Diterbitkan dalam Satu Tahun	Tercapai
Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	Prosentase Pengendalian Perusahaan Yang Berinvestasi	Tercapai
Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	Prosentase Data Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dikelola	Tercapai
Dinas Pemuda Dan Olahraga	Nilai IKM	Tercapai
Dinas Pemuda Dan Olahraga	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Tercapai
Dinas Pemuda Dan Olahraga	Persentase Atlit Berprestasi	Tercapai
Dinas Pemuda Dan Olahraga	Persentase Kwaran yang Meningkatkan Kapasitasnya	Tercapai
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Nilai IKM	Tercapai
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Prosentase Peningkatan Perpustakaan Sesuai Standart Nasional Perpustakaan	Tercapai
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Prosentase Koleksi Daerah dan Naskah Kuno Yang Dilestarikan	Tercapai
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	Tercapai
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Persentase Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban	Tercapai
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Persentase Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dengan NSPK	Tercapai
Dinas Perikanan	Nilai IKM	Tercapai
Dinas Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Tercapai
Dinas Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Tidak Tercapai
Dinas Perikanan	Persentase Cakupan Wilayah Potensi Perikanan Yang Dilakukan Pengawasan	Tercapai
Dinas Perikanan	Jumlah Ikan Yang Diolah	Tercapai



Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Nilai IKM	Tercapai
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Persentase budaya lokal yang dikembangkan	Tercapai
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Persentase kelompok seni tradisional yang dikembangkan	Tercapai
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Persentase Cagar Budaya yang di Lestarikan	Tercapai
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Persentase Museum yang dikelola	Tercapai
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Tercapai
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata yang dipromosikan	Tercapai
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya	Tercapai
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Nilai IKM	Tercapai
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Prosentase sarana peternakan dalam kondisi baik	Tercapai
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Prosentase prasarana peternakan dalam kondisi baik	Tercapai
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Prosentase Ternak Ruminansia Yang Terlayani	Tercapai
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Prosentase Ternak Unggas Yang Terlayani	Tercapai
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Prosentase Fasilitas Penanggulangan Bencana Penyakit	Tercapai
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Prosentase Peningkatan Produk Hewan Yang ASUH	Tercapai
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Prosentase ternak betina peserta AUTSK	Tercapai
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Prosentase peningkatan legalitas usaha peternakan	Tercapai
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Prosentase kemampuan kelas kelompok	Tercapai
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Nilai IKM	Tercapai
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Prosentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Tercapai
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Prosentase koefisien variasi harga antar waktu	Tercapai
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	net ekspor (rupiah)	Tercapai
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Prosentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Tercapai



Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Prosentase peningkatan omset produk lokal	Tercapai
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Prosentase penambahan industri kecil dan menengah	Tercapai
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan IKM Formal	Tercapai
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Prosentase data IKM yang masuk dalam SINAS	Tercapai
Bagian Perencanaan dan Keuangan	Prosentase Bagian di Setda yang Perencanaan dan Penatausahaan Keuangannya serta Pelaporannya Telah Tertib dan Sesuai Aturan	Tercapai
Bagian Umum	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Setda dan Pimpinan	Tercapai
Bagian Hukum	Prosentase Regulasi Yang Di Tetapkan	Tercapai
Bagian Kesejahteraan Rakyat	Presentase Kebijakan Daerah Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	Tercapai
Bagian Tata Pemerintahan	Persentase Kebijakan Lingkup Pemerintahan Yang Ditindak Lanjuti	Tercapai
Bagian Perekonomian	Prosentase kebijakan strategis bidang Perekonomian Yang Ditindaklanjuti	Tercapai
Bagian Administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Strategis Bidang Administrasi Pembangunan Yang Disusun Sesuai Ketentuan	Tercapai
Bagian Pengadaan barang dan Jasa	Prosentase Kebijakan Lingkup Pengadaan Barang dan Jasa Yang Ditindaklanjuti	Tercapai
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Informasi dan Kegiatan Pimpinan yang Terpublikasi	Tercapai
Bagian Organisasi	Persentase Kebijakan Strategis Bidang Organisasi Yang Ditindaklanjuti	Tercapai
Bagian Kerja Sama	Prosentase Kerjasama Yang Disahkan/Ditetapkan	Tercapai
Bagian Sumber Daya Alam	Prosentase Kebijakan Lingkup Bidang Sumber Daya Alam Yang Ditindaklanjuti	Tercapai
Sekretariat DPRD	Nilai IKM	Tercapai
Sekretariat DPRD	Presentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Yang Terasilitasi	Tercapai
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Nilai IKM	Tercapai
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Tepat Waktu	Tercapai
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Selaras dan Berorientasi Hasil	Tercapai
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Peningkatan Hasil Penelitian/Kajian Yang Ditindaklanjuti Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan Daerah	Tercapai



Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian
BPKAD	Nilai IKM	Tercapai
BPKAD	Prosentase pelaksanaan penganggaran APBD yang tepat waktu	Tercapai
BPKAD	Prosentase pelaksanaan pelayanan penatausahaan sesuai standard daerah	Tercapai
BPKAD	Prosentase ketepatan laporan keuangan	Tercapai
BPKAD	Prosentase Laporan Barang Milik Daerah Yang Di Susun Secara Tertib Administrasi, Fisik, dan Hukum	Tercapai
Badan Pendapatan Daerah	Nilai IKM	Tercapai
Badan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak	Tercapai
Badan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	Tercapai
Badan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya	Tidak Tercapai
BKPSDM	Nilai IKM	Tercapai
BKPSDM	Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	Tercapai
BKPSDM	Nilai Dimensi Kompetensi ASN	Tidak Tercapai
Inspektorat	Nilai IKM	Tercapai
Inspektorat	Presentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan APIP Yang Ditindaklanjuti	Tercapai
Inspektorat	Presentase Rekomendasi Laporan Pengawasan BPK Yang Ditindaklanjuti	Tercapai
Inspektorat	Persentase Perumusan Kebijakan Yang Dilegalitaskan	Tercapai
Kecamatan Lamongan	Nilai IKM	Tercapai
Kecamatan Lamongan	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	Tercapai
Kecamatan Lamongan	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	Tercapai
Kecamatan Lamongan	Persentase Konflik yang tertangani	Tercapai
Kecamatan Lamongan	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	Tercapai
Kecamatan Lamongan	Persentase Desa Naik Kelas	Tercapai
Kecamatan Babat	Nilai IKM	Tercapai
Kecamatan Babat	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	Tercapai
Kecamatan Babat	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	Tercapai
Kecamatan Babat	Persentase Desa Naik Kelas	Tercapai
Kecamatan Paciran	Nilai IKM	Tidak Tercapai
Kecamatan Paciran	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	Tercapai
Kecamatan Paciran	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	Tercapai
Kecamatan Paciran	Persentase Desa Naik Kelas	Tercapai
Kecamatan Brondong	Nilai IKM	Tercapai



Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian
Kecamatan Brondong	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	Tercapai
Kecamatan Brondong	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	Tercapai
Kecamatan Brondong	Persentase Konflik yang tertangani	Tercapai
Kecamatan Brondong	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	Tercapai
Kecamatan Brondong	Persentase Desa Naik Kelas	Tercapai
Kecamatan Turi	Nilai IKM	Tercapai
Kecamatan Turi	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	Tercapai
Kecamatan Turi	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	Tercapai
Kecamatan Turi	Persentase Konflik yang tertangani	Tercapai
Kecamatan Turi	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	Tercapai
Kecamatan Turi	Persentase Desa Naik Kelas	Tercapai
Kecamatan Pucuk	Nilai IKM	Tercapai
Kecamatan Pucuk	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	Tercapai
Kecamatan Pucuk	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	Tercapai
Kecamatan Pucuk	Persentase Konflik yang tertangani	Tercapai
Kecamatan Pucuk	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	Tercapai
Kecamatan Pucuk	Persentase Desa Naik Kelas	Tercapai
Kecamatan Sukodadi	Nilai IKM	Tercapai
Kecamatan Sukodadi	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	Tercapai
Kecamatan Sukodadi	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	Tercapai
Kecamatan Sukodadi	Persentase Konflik yang tertangani	Tercapai
Kecamatan Sukodadi	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	Tercapai
Kecamatan Sukodadi	Persentase Desa Naik Kelas	Tercapai
Kecamatan Tikung	Nilai IKM	Tercapai
Kecamatan Tikung	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	Tercapai
Kecamatan Tikung	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	Tercapai
Kecamatan Tikung	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	Tercapai
Kecamatan Tikung	Persentase Desa Naik Kelas	Tercapai
Kecamatan Deket	Nilai IKM	Tidak Tercapai
Kecamatan Deket	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	Tercapai



Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian
Kecamatan Deket	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	Tercapai
Kecamatan Deket	Persentase Konflik yang tertangani	Tercapai
Kecamatan Deket	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	Tercapai
Kecamatan Deket	Persentase Desa Naik Kelas	Tidak Tercapai
Kecamatan Kalitengah	Nilai IKM	Tercapai
Kecamatan Kalitengah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	Tercapai
Kecamatan Kalitengah	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	Tercapai
Kecamatan Kalitengah	Persentase Desa Naik Kelas	Tercapai
Kecamatan Kembangbahu	Nilai IKM	Tercapai
Kecamatan Kembangbahu	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	Tercapai
Kecamatan Kembangbahu	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	Tercapai
Kecamatan Kembangbahu	Persentase Konflik yang tertangani	Tercapai
Kecamatan Kembangbahu	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	Tercapai
Kecamatan Kembangbahu	Persentase Desa Naik Kelas	Tercapai
Kecamatan Mantup	Nilai IKM	Tercapai
Kecamatan Mantup	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	Tercapai
Kecamatan Mantup	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	Tercapai
Kecamatan Mantup	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	Tercapai
Kecamatan Mantup	Persentase Desa Naik Kelas	Tercapai
Kecamatan Modo	Nilai IKM	Tercapai
Kecamatan Modo	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	Tercapai
Kecamatan Modo	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	Tercapai
Kecamatan Modo	Persentase Konflik yang tertangani	Tercapai
Kecamatan Modo	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	Tercapai
Kecamatan Modo	Persentase Desa Naik Kelas	Tercapai
Kecamatan Bluluk	Nilai IKM	Tercapai
Kecamatan Bluluk	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	Tercapai
Kecamatan Bluluk	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	Tercapai
Kecamatan Bluluk	Persentase Konflik yang tertangani	Tercapai
Kecamatan Bluluk	Persentase Desa Naik Kelas	Tercapai
Kecamatan Karangbinangun	Nilai IKM	Tercapai



Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian
Kecamatan Karangbinangun	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	Tercapai
Kecamatan Karangbinangun	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	Tercapai
Kecamatan Karangbinangun	Persentase Konflik yang tertangani	Tercapai
Kecamatan Karangbinangun	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	Tercapai
Kecamatan Karangbinangun	Persentase Desa Naik Kelas	Tercapai
Kecamatan Glagah	Nilai IKM	Tercapai
Kecamatan Glagah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	Tercapai
Kecamatan Glagah	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	Tercapai
Kecamatan Glagah	Persentase Desa Naik Kelas	Tidak Tercapai
Kecamatan Ngimbang	Nilai IKM	Tidak Tercapai
Kecamatan Ngimbang	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	Tercapai
Kecamatan Ngimbang	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	Tercapai
Kecamatan Ngimbang	Persentase Konflik yang tertangani	Tercapai
Kecamatan Ngimbang	Persentase Desa Naik Kelas	Tercapai
Kecamatan Sugio	Nilai IKM	Tercapai
Kecamatan Sugio	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	Tercapai
Kecamatan Sugio	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	Tercapai
Kecamatan Sugio	Persentase Konflik yang tertangani	Tercapai
Kecamatan Sugio	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	Tercapai
Kecamatan Sugio	Persentase Desa Naik Kelas	Tercapai
Kecamatan Karanggeneng	Nilai IKM	Tercapai
Kecamatan Karanggeneng	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	Tercapai
Kecamatan Karanggeneng	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	Tercapai
Kecamatan Karanggeneng	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	Tercapai
Kecamatan Karanggeneng	Persentase Desa Naik Kelas	Tercapai
Kecamatan Sambeng	Nilai IKM	Tercapai
Kecamatan Sambeng	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	Tercapai
Kecamatan Sambeng	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	Tercapai
Kecamatan Sambeng	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	Tercapai



Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian
Kecamatan Sambeng	Persentase Desa Naik Kelas	Tercapai
Kecamatan Kedungpring	Nilai IKM	Tercapai
Kecamatan Kedungpring	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	Tercapai
Kecamatan Kedungpring	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	Tercapai
Kecamatan Kedungpring	Persentase Konflik yang tertangani	Tercapai
Kecamatan Kedungpring	Persentase Desa Naik Kelas	Tercapai
Kecamatan Laren	Nilai IKM	Tercapai
Kecamatan Laren	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	Tercapai
Kecamatan Laren	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	Tercapai
Kecamatan Laren	Persentase Konflik yang tertangani	Tercapai
Kecamatan Laren	Persentase Desa Naik Kelas	Tercapai
Kecamatan Sekaran	Nilai IKM	Tercapai
Kecamatan Sekaran	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	Tercapai
Kecamatan Sekaran	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	Tercapai
Kecamatan Sekaran	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	Tercapai
Kecamatan Sekaran	Persentase Desa Naik Kelas	Tidak Tercapai
Kecamatan Sarirejo	Nilai IKM	Tidak Tercapai
Kecamatan Sarirejo	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	Tercapai
Kecamatan Sarirejo	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	Tercapai
Kecamatan Sarirejo	Persentase Desa Naik Kelas	Tercapai
Kecamatan Sukorame	Nilai IKM	Tercapai
Kecamatan Sukorame	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	Tercapai
Kecamatan Sukorame	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	Tercapai
Kecamatan Sukorame	Persentase Konflik yang tertangani	Tercapai
Kecamatan Sukorame	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	Tercapai
Kecamatan Sukorame	Persentase Desa Naik Kelas	Tercapai
Kecamatan Solokuro	Nilai IKM	Tercapai
Kecamatan Solokuro	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	Tercapai
Kecamatan Solokuro	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	Tercapai
Kecamatan Solokuro	Persentase Desa Naik Kelas	Tercapai
Kecamatan Maduran	Nilai IKM	Tercapai



Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian
Kecamatan Maduran	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	Tercapai
Kecamatan Maduran	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	Tercapai
Kecamatan Maduran	Persentase Desa Naik Kelas	Tercapai
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai IKM	Tercapai
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Peningkatan dan Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Bagi Pemuda	Tercapai
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat	Tercapai
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Ormas, Orpem dan LSM Yang Bertentangan Dengan Asas Pancasila	Tercapai
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Tercapai
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tercapai
RSUD Karangembang	Nilai IKM Internal RSUD	Tercapai
RSUD Karangembang	Persentase SPM	Tercapai

Rekapitulasi

$$\frac{\text{Jumlah Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah yang Tercapai}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{333}{349} \times 100\%$$

$$= 95,13\%$$

LAMPIRAN 4: Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023

SALINAN



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 400.10.11-6287 TAHUN 2023

TENTANG

INDEKS INOVASI DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2023

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian terhadap laporan penerapan inovasi daerah dan mengusulkan calon penerima penghargaan inovasi daerah;
- b. bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengukuran indeks inovasi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan atau Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);

Memperhatikan : 1. Revisi ke-10 (kesepuluh) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-010.111.1.403222/2023 tanggal 16 Agustus 2023;

2. Berita Acara Hasil Validasi dan *Quality Control* Inovasi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023 Nomor 000.10/4885/BSKDN tanggal 14 September 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG INDEKS INOVASI DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2023.

KESATU : Melakukan pengukuran Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dengan cara menganalisis variabel dan indikator Indeks Inovasi Daerah.

KEDUA : Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah laporan informasi data inovasi daerah berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah yang telah divalidasi dan dilakukan *quality control* oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM) *Scientific Modeling, Application, Research, and Training for City-Centered Innovation and Technology* (SMART CITY) Universitas Indonesia dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.



- 3 -

- KETIGA : Menetapkan Indeks Inovasi daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023 dengan kategori sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif dan tidak dapat dinilai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2023
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Umum

Evan Nur Setya Hadi, S.STP, M.A.P
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19771124 199810 1 001



-3-

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
35	Kabupaten Tanggamus	60,94	Sangat Inovatif
36	Kabupaten Klungkung	60,77	Sangat Inovatif
37	Kabupaten Malang	60,58	Sangat Inovatif
38	Kabupaten Hulu Sungai Utara	60,48	Sangat Inovatif
39	Kabupaten Pati	60,40	Sangat Inovatif
40	Kabupaten Tegal	60,33	Sangat Inovatif
41	Kabupaten Sumedang	60,06	Sangat Inovatif
42	Kabupaten Bangka Tengah	59,39	Inovatif
43	Kabupaten Deli Serdang	59,10	Inovatif
44	Kabupaten Kutai Kartanegara	58,69	Inovatif
45	Kabupaten Bintan	58,66	Inovatif
46	Kabupaten Kulon Progo	58,44	Inovatif
47	Kabupaten Pesisir Selatan	58,34	Inovatif
48	Kabupaten Rembang	58,32	Inovatif
49	Kabupaten Pelalawan	58,21	Inovatif
50	Kabupaten Lampung Utara	58,12	Inovatif
51	Kabupaten Jember	57,97	Inovatif
52	Kabupaten Magelang	57,83	Inovatif
53	Kabupaten Banjar	57,64	Inovatif
54	Kabupaten Sleman	57,23	Inovatif
55	Kabupaten Cilacap	56,93	Inovatif
56	Kabupaten Lombok Utara	56,92	Inovatif
57	Kabupaten Lamongan	56,55	Inovatif
58	Kabupaten Sukoharjo	56,48	Inovatif
59	Kabupaten Sumbawa Barat	56,15	Inovatif
60	Kabupaten Dompu	56,03	Inovatif
61	Kabupaten Karo	55,96	Inovatif
62	Kabupaten Sambas	55,87	Inovatif
63	Kabupaten Musi Rawas	55,75	Inovatif
64	Kabupaten Muara Enim	55,71	Inovatif
65	Kabupaten Dharmas Raya	55,61	Inovatif
66	Kabupaten Kudus	55,57	Inovatif
67	Kabupaten Ogan Komering Ilir	55,56	Inovatif
68	Kabupaten Subang	55,48	Inovatif
69	Kabupaten Luwu Timur	55,29	Inovatif
70	Kabupaten Tanah Laut	55,14	Inovatif
71	Kabupaten Pasaman Barat	55,03	Inovatif
72	Kabupaten Pasuruan	54,99	Inovatif
73	Kabupaten Banyumas	54,92	Inovatif
74	Kabupaten Karang Asem	54,79	Inovatif
75	Kabupaten Gunung Kidul	54,67	Inovatif
76	Kabupaten Lumajang	54,60	Inovatif
77	Kabupaten Mamuju Tengah	54,50	Inovatif
78	Kabupaten Buleleng	54,30	Inovatif
79	Kabupaten Pasaman	54,14	Inovatif
80	Kabupaten Sumba Timur	53,97	Inovatif
81	Kabupaten Sanggau	53,94	Inovatif
82	Kabupaten Belitung Timur	53,69	Inovatif
83	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	53,66	Inovatif
84	Kabupaten Halmahera Selatan	53,57	Inovatif
85	Kabupaten Barito Selatan	53,36	Inovatif



LAMPIRAN 5

Matriks Rencana Strategis

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Berorientasi Hasil	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan	Prosentase Indikator Kinerja Daerah yang Tercapai	-	70,59%	73,53%	76,47%	79,41%	82,35%
		Prosentase Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Tercapai	-	71,60%	75,31%	79,01%	82,72%	86,42%
		Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	-	70,59%	72,76%	75,23%	77,71%	80,19%
	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah (IID)	804 (Skor)	40,00	42,00	46,00	52,00	60,00
	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Bappelitbangda	89,79	89,81	89,82	89,83	89,84	89,85



LAMPIRAN 6

Perjanjian Kinerja Tahun 2023



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **SUJARWO, S.T., M.M**
Jabatan : **Kepala Bappelitbangda Kabupaten Lamongan**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA**
Jabatan : **Bupati Lamongan**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

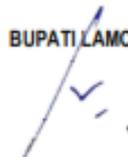
Lamongan, September 2023

<p>PIHAK KEDUA BUPATI LAMONGAN</p>  <p>Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA</p>	<p>PIHAK PERTAMA PIL. KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN LAMONGAN</p>  <p>SUJARWO, S.T., M.M Pembina Utama Muda NIP. 19740930 200112 1 005</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

NO (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan	Prosentase Indikator Kinerja Daerah Yang Tercapai	91,18%
		Prosentase Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Yang Tercapai	86,74%
		Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	94,26%
2	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah (IID)	59,00
3	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Bappelitbangda	91,45

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10,447,417,000	APBD
2 Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 1,750,000,000	APBD
3 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 2,900,000,000	APBD
4 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 732,000,000	APBD

BUPATI LAMONGAN

Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA

Lamongan, September 2023
**Pit. KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN LAMONGAN**

SUJARWO, ST., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740930 200112 1 005

LAMPIRAN 6

Pengukuran Kinerja Tahun 2023

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capaian			
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan	Presentase Indikator Kinerja Daerah Yang Tercapai	-	-	-	91,18%	-	-	-	87,88%	0%	0%	0%	96,38%
		Presentase Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Yang Tercapai	-	-	-	86,74%	-	-	-	85,13%	0%	0%	0%	98,14%
		Presentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	-	-	-	94,26%	-	-	-	95,13%	0%	0%	0%	100,92%
2	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah (IID)	-	-	59,00	-	-	-	56,55	-	0%	0%	95,85%	95,85%
3	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Bappelitbangda	-	-	-	91,45	-	-	-	91,67	0%	0%	0%	100,24%

Keterangan:

- Terdapat beberapa IKD dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang tidak tercapai dikarenakan faktor eksternal yaitu kemarau panjang dan kekeringan akibat perubahan musim yang tidak pasti, sehingga berdampak pada hasil panen sektor pertanian dan pendapatan masyarakat.
- Menurunnya pendapatan asli daerah menyebabkan beberapa program pembangunan tidak dapat dilaksanakan sehingga berdampak pada capaian output/outcomes Perangkat Daerah

Lamongan, Januari 2024
**KEPALA BAPPELITBANGDA
 KABUPATEN LAMONGAN**

SUJARWO, ST., MM.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19740930 200112 1 005



LAMPIRAN 7

Penghargaan-Penghargaan



Terbaik 1 Kategori Kabupaten

Penghargaan Pembangunan
Daerah (PPD) Tahun 2023

Oleh Bappeda Prov. Jawa Timur



TOP 10 Lomba K3L Antar Perangkat Daerah

Dalam Rangka Hari Jadi Lamongan Ke-454

Oleh Bupati Lamongan



Kategori Sangat Baik Audit Kearsipan Internal Tahun 2023

Oleh Bupati Lamongan



**PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN**

2023